

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN

2019

PENGAYOMAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

Jl. P.Natadirja KM. 7, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38225, Telp : (0736) 247430 - 22234,
Laman: <https://bengkulu.kemenkumham.go.id>, Email: pplkanwilbengkulu@gmail.com



**REFORMASI
HUKUM**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Umum	1
2. Visi dan Misi	2
B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1. Divisi Administrasi.....	7
2. Divisi Pemasarakatan	8
3. Divisi Keimigrasian.....	8
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.....	8
5. Struktur Organisasi Kanwil Kemenkuham	9
1. Kantor Wilyah Kemenkumham Bengkulu	10
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)	10
3. Berdasarkan Golongan	12
4. Jumlah Satuan Kerja	12
C. SISTEMATIKA LAPORAN	13
D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS	19
B. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2019	23
1. Divisi Administrasi	27
2. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	29
3. Divisi Keimigrasian	39
4. Divisi Pemasarakatan	40

BAB III AKUNTABILITAS KERJA	42
1. Divisi Administrasi	42
A. Capaian Kinerja	59
B. Realisasi Anggaran	60
C. Analisa	61
2. Divisi Per masyarakatan	61
2.1. Pemberian Remisi	61
2.2. Pelatihan dan Pembinaan WBP	62
2.3. Pembinaan Kepada Narapidana Kasus Terorisme	63
2.4. Kordinasi dengan Dilkumjakpol	65
A. Capaian Kerja	66
B. Realisasi Anggaran	67
C. Analisa	67
3. Divisi Keimigrasian	68
1. Pelaksanaan Sosialisasi Keimigrasian	70
2. Laporan Penerbitan Paspor	71
A. Capaian Kinerja	71
B. Realisasi Anggaran	72
C. Analisa	72
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	72
A. Capaian Kinerja	78
B. Realisasi Anggaran	83
C. Analisa	86
 BAB IV PENUTUP	 89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN	90
 LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan Rahmat-Nya Penyusunan “Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2019” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu merupakan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2019. Hal ini sebagai upaya memberikan jawaban atas sejauh mana jajaran Kantor Wilayah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 yang berfungsi sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan pekerjaan.

Secara umum pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai barometer pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan jajaran pada angka **99.62 %** baik dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Bengkulu maupun kegiatan teknis lainnya.

Sebagai penutup kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelsaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran yang akan datang.

Kepala Kantor Wilayah,

Abdul Hany
NIP. 196005161985031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Tahun 2019 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu selama tahun 2019 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi selain fungsi akuntabilitas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Dilihat dari pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang baik terlihat jelas bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menunjukkan keberhasilan program – program yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sudah secara tepat melaksanakan kebijakan – kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Realisasi Anggaran Periode Januari s.d Desember Tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebagai berikut :

**Realisasi Anggaran Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019 Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu**

No	Satuan Kerja	PAGU (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Kanwil Bengkulu Ditjen AHU	1.900.000.000	1.892.641.500	99.61 %
2	Kanwil Bengkulu Ditjen PAS	582.476.000	576.539.094	98.98 %
3	Kanwil Bengkulu Ditjen Imigrasi	515.866.000	511.290.266	99.11 %
4	Kanwil Bengkulu Ditjen KI	153.057.000	152.526.000	99.65 %
5	Kanwil Bengkulu Ditjen PP	141.730.000	139.396.200	98.35 %
6	Kanwil Bengkulu Setjen	13.007.802.000	12.947.096.845	99.80 %
7	Kanwil Bengkulu Ditjen HAM	238.984.000	238.731.200	99.89 %
8	Kanwil Bengkulu Ditjen BPHN	2.090.983.000	2.058.619.700	98.45 %
9	Kanwil Bengkulu BalitbangHAM	38.980.000	38.370.000	98.44 %
10	Lapas Arga Makmur	8.832.418.000	8.653.553.962	98 %
11	Lapas Bengkulu	14.297.405.000	14.668.397.065	103 %
12	Lapas Curup	11.581.780.000	11.369.384.711	98 %
13	Rutan Manna	6.291.364.000	6.249.104.283	99 %
14	Rutan Bengkulu	8.401.841.000	8.149.362.079	97 %
15	Rupbasan Arma	1.414.376.000	1.391.062.952	98 %
16	Rupbasan Bengkulu	1.924.863.000	1.874.989.964	97 %
17	Lapas Perempuan	5.123.022.000	5.086.591.954	99 %
18	Lapas Khusus Anak	25.875.733.000	25.802.910.784	99 %
19	Kanwil Bengkulu	7.068.891.000	7.008.805.379	99 %
20	Bapas Bengkulu	4.812.170.000	5.399.837.359	112 %
	TOTAL	114.293.741.000	114.209.211.297	99.92 %

Dari alokasi anggaran tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 114.209.211.297,- dan presentase sebesar 99.92 % adapun pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (Tiga) komponen yaitu :

1. Belanja Pegawai

No	Satuan Kerja	PAGU (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Kanwil Bengkulu Ditjen AHU			
2	Kanwil Bengkulu Ditjen PAS			
3	Kanwil Bengkulu Ditjen Imigrasi			
4	Kanwil Bengkulu Ditjen KI			
5	Kanwil Bengkulu Ditjen PP			
6	Kanwil Bengkulu Setjen	9.572.385.000	9.543.606.379	99.70 %
7	Kanwil Bengkulu Ditjen HAM			
8	Kanwil Bengkulu Ditjen BPHN			

9	Kanwil Bengkulu BalitbangHAM			
10	Lapas Arga Makmur	4.632.736.000	4.622.939.844	99.79 %
11	Lapas Bengkulu	7.564.778.000	7.962.567.669	105.26 %
12	Lapas Curup	5.310.068.000	5.194.047.227	97.82 %
13	Rutan Manna	3.714.463.000	3.774.424.564	101.61 %
14	Rutan Bengkulu	3.075.368.000	3.370.026.967	109.58 %
15	Rupbasan Arma	1.036.208.000	1.035.740.168	99.95 %
16	Rupbasan Bengkulu	1.550.125.000	1.501.385.364	96.86 %
17	Lapas Perempuan	3.560.484.000	3.615.144.409	101.54 %
18	Lapas Khusus Anak	3.438.579.000	3.402.532.554	98.95 %
19	Kanim Bengkulu	3.358.224.000	3.342.654.969	99.54 %
20	Bapas Bengkulu	3.914.321.000	4.502.843.624	115.04 %
	Total	50.727.739.000	51.867.913.738	102.22%

Dari Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 untuk komponen belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp. 51.867.913.738,- atau 102.22 %.

2. Belanja Barang

No	Satuan Kerja	PAGU (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Kanwil Bengkulu Ditjen AHU	1.900.000.000	1.892.641.500	99.61 %
2	Kanwil Bengkulu Ditjen PAS	582.476.000	576.539.094	98.98 %
3	Kanwil Bengkulu Ditjen Imigrasi	515.866.000	511.290.266	99.11 %
4	Kanwil Bengkulu Ditjen KI	153.057.000	152.526.000	99.65 %
5	Kanwil Bengkulu Ditjen PP	141.730.000	139.396.200	98.35 %
6	Kanwil Bengkulu Setjen	3.435.417.000	3.403.490.466	99.07 %
7	Kanwil Bengkulu Ditjen HAM	238.984.000	238.731.200	99.89 %
8	Kanwil Bengkulu Ditjen BPHN	2.090.983.000	2.058.619.700	98.45 %
9	Kanwil Bengkulu BalitbangHAM	38.980.000	38.370.000	98.44 %
10	Lapas Arga Makmur	4.199.682.000	4.030.614.118	95.97 %
11	Lapas Bengkulu	6.732.627.000	6.705.829.396	99.60 %
12	Lapas Curup	6.271.712.000	6.175.337.484	98.46 %
13	Rutan Manna	2.576.901.000	2.474.679.719	96.03 %
14	Rutan Bengkulu	5.326.473.000	4.779.335.112	89.73 %
15	Rupbasan Arma	378.168.000	355.322.784	93.96 %
16	Rupbasan Bengkulu	374.738.000	373.604.600	99.70 %
17	Lapas Perempuan	1.562.538.000	1.471.447.545	94.17 %
18	Lapas Khusus Anak	583.232.000	572.293.400	98.12 %
19	Kanim Bengkulu	2.805.563.000	2.777.196.410	98.99 %
20	Bapas Bengkulu	897.849.000	896.993.735	99.90 %
	Total	40.806.976.000	39.624.258.729	97.10 %

Dari alokasi anggaran tahun 2019 untuk komponen belanja barang telah terealisasi sebesar Rp. 39.624.258.729,- dari jumlah Pagu sebesar Rp. 40.806.976.000,- atau persentase sebesar 97.10%.

3. Belanja Modal

No	Satuan Kerja	PAGU (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Kanwil Bengkulu Ditjen AHU			
2	Kanwil Bengkulu Ditjen PAS			
3	Kanwil Bengkulu Ditjen Imigrasi			
4	Kanwil Bengkulu Ditjen KI			
5	Kanwil Bengkulu Ditjen PP			
6	Kanwil Bengkulu Setjen			
7	Kanwil Bengkulu Ditjen HAM			
8	Kanwil Bengkulu Ditjen BPHN			
9	Kanwil Bengkulu BalitbangHAM			
10	Lapas Arga Makmur			
11	Lapas Bengkulu			
12	Lapas Curup			
13	Rutan Manna			
14	Rutan Bengkulu			
15	Rupbasan Arma			
16	Rupbasan Bengkulu			
17	Lapas Perempuan			
18	Lapas Khusus Anak	21.853.922.000	21.828.084.830	99.88 %
19	Kanim Bengkulu	905.104.000	888.954.000	98.22 %
20	Bapas Bengkulu			
	Total	22.759.026.000	22.717.038.830	99.81 %

Dari alokasi anggaran tahun 2019 untuk komponen belanja modal telah terealisasi sebesar Rp. 22.717.038.830,- dari jumlah Pagu sebesar Rp. 22.759.026.000,- atau persentase sebesar 99.81%. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan Lapas Khusus Anak dan Pembangunan untuk ruang pelayanan Paspor.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu akan melakukan peningkatan pada Tahun 2020 antara lain dengan :

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya (sesuai dengan yang telah direncanakan) dengan tetap berpegang pada akuntabilitas pelaksanaan anggaran;
- 2) Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan penataan organisasi dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk mewujudkan Visi Kementerian Hukum “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” melalui pelayanan prima kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah,

Abdul Hany
NIP. 19600516 198503 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu merupakan unit/satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah propinsi Bengkulu, oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu memiliki fungsi sebagai pengordinasi pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Dengan kata lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berperan dalam memberikan pembinaan dan dukungan administrasi UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu juga memiliki peran penting dalam perencanaan program, pengendalian program, pelaporan, pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum, pelayanan dan penegakan hak asasi manusia serta pelaksanaan urusan administrasi umum. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penyelenggaraan roda pemerintahan, baik pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta senantiasa melakukan penegakan supremasi hukum. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara dalam konsep nawa cita yang menjadi arah dan kebijakan pembangunan nasional.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam kurun waktu tahun 2019. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk

pertanggung jawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun Anggaran 2019.

2. Visi dan Misi

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI memuat Visi, Misi serta Tata Nilai Kementerian seperti tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015

Visi : Masyarakat memperoleh kepastian Hukum

Visi Kantor Wilayah adalah perumusan kondisi masa depan yang ingin dicapai Kantor Wilayah sebagaimana visi Kementerian Hukum dan HAM yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian. Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yaitu:

1. Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia;
6. Mewujudkan aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORAGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal

Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi (Administrasi, Pemasarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum dan HAM). Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan tugas fungsi, yaitu :

Tugas : "Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Fungsi :

- a. Pengkordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengkordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang keimigrasian dan bidang pemasarakatn;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2019.

Susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu terdiri atas 4 Divisi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

Divisi Administrasi	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah. 2. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan. 3. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi. 4. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara. 5. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi. 6. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah. 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.
Divisi Pemasarakatan	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan

	<p>dan ketertiban.</p> <p>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan.</p> <p>4. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanan Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
Divisi Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.	<p>1. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</p> <p>2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan</p>

	<p>anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.</p> <p>4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya. 2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak

	<p>asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keempat divisi tersebut diatas dibagi menjadi 9 bagian/ bidang dan 18 subbagian / subbidang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu :

- a. Bagian Umum
 - Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- b. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
 - Subbagian Program dan Pelaporan

- Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

2. Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang, yaitu :

- a. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
 - Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama
 - Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
- b. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
 - Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
 - Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

3. Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang yaitu :

- a. Bidang Perjanjian dan Informasi Keimigrasian
 - Subbidang Perijinan Keimigrasian
 - Subbidang Informasi Keimigrasian
- b. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - Subbidang Intelijen Keimigrasian
 - Subbidang Penindakan Keimigrasian

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri dari 2 bidang yaitu :

- a. Bidang Pelayanan Hukum
 - Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
- b. Bidang Hukum
 - Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

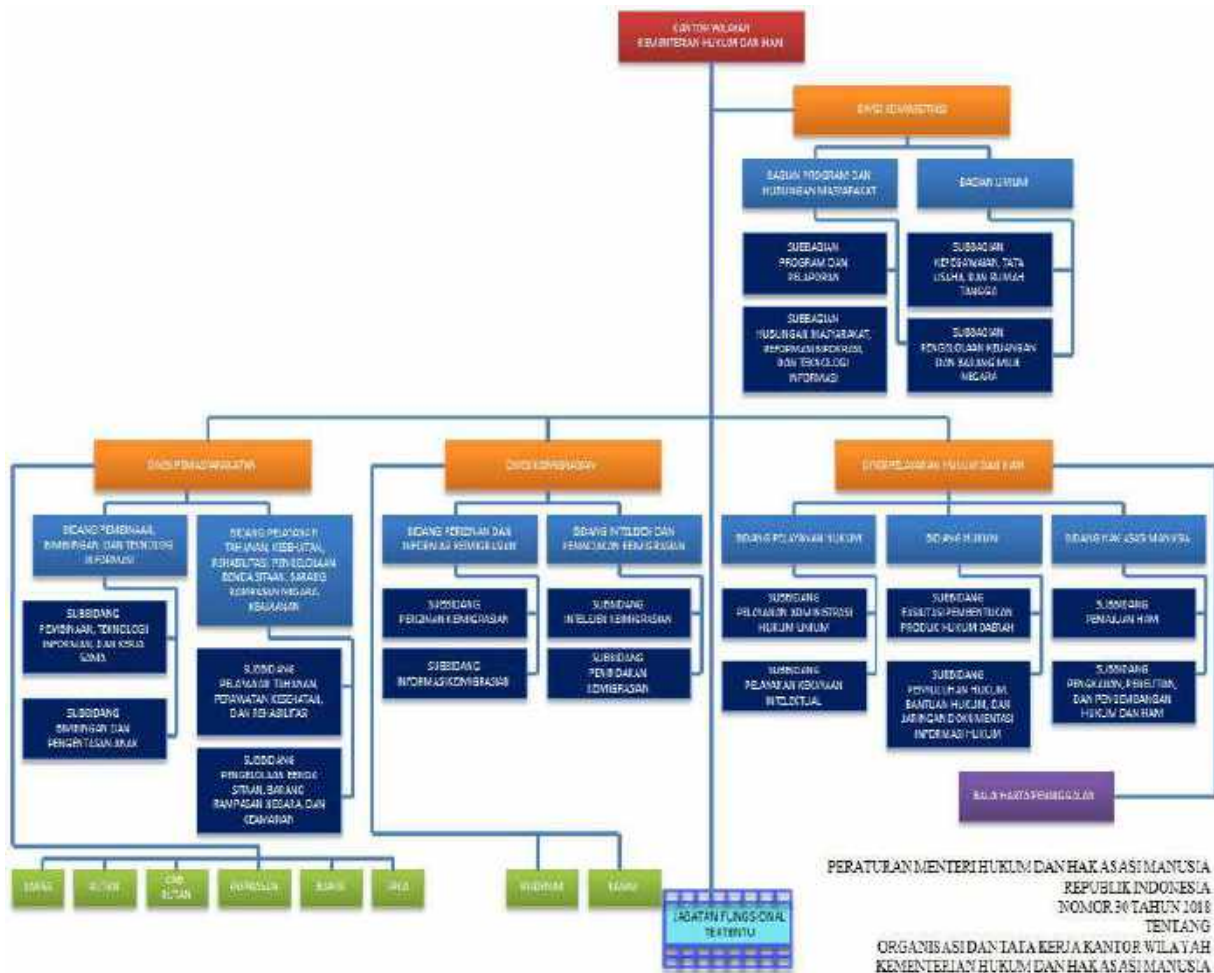
- Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

c. Bidang Hak Asasi Manusia

- Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
- Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah sesuai dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu per tanggal 1 Januari 2019 menunjukkan terdapat 859 pegawai yang tersebar di empat divisi dan 11 UPT. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

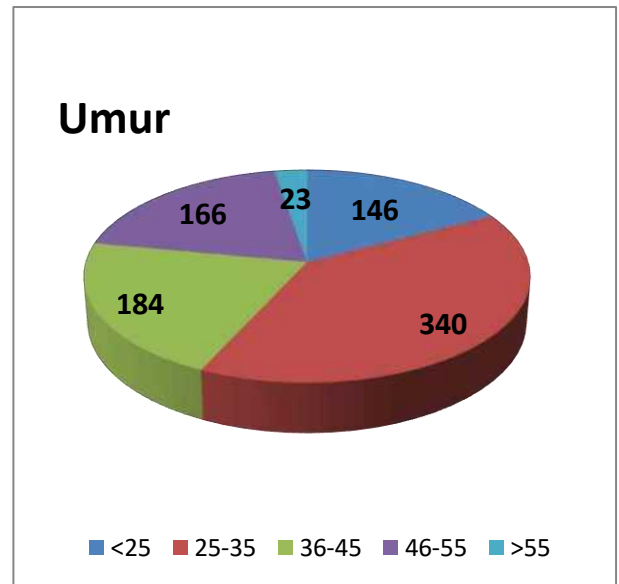
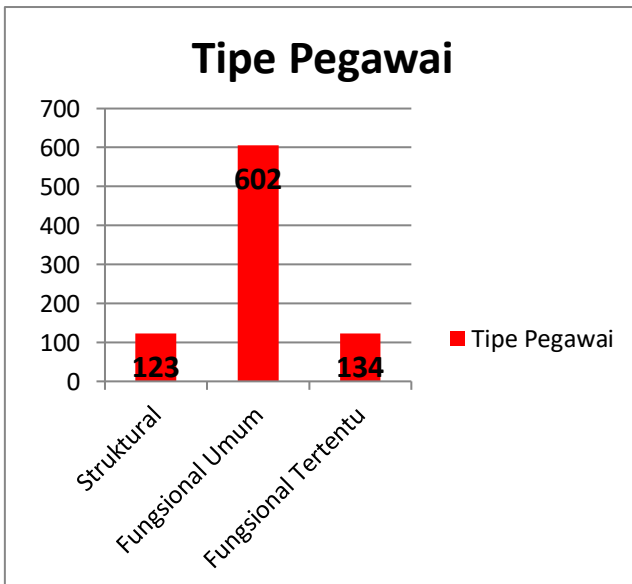
1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu

NO	DIVISI	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	Divisi Administrasi	26	14	40
2.	Divisi Masyarakat	12	6	18
3.	Divisi Keimigrasian	9	4	13
4.	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	38	25	63
JUMLAH		86	49	135

2. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bengkulu	112	32	135
2.	Lembaga Masyarakat Kelas IIA Curup	80	11	91
3.	Lembaga Masyarakat Kelas IIB Arga Makmur	65	10	75
4.	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna	58	5	63

5.	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu	52	10	62
6.	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Bengkulu	19	5	24
7.	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas II Arga Makmur	14	3	17
8.	Balai Pemasarakatan Kelas II Bengkulu	46	23	69
9.	Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu	36	17	53
10.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Bengkulu (LPKA)	53	11	64
11.	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu	23	48	71
JUMLAH		558	166	724



3. Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
I/a	1
I/d	1
II/a	242
II/b	33
II/c	64
II/d	33
III/a	125
III/b	139
III/c	75
III/d	101
IV/a	24
IV/b	16
IV/c	12
IV/d	8
Jumlah	859

4. Jumlah Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Bengkulu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 11 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, sebagai berikut:

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS
1	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu
2	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup
3	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur
4	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Manna

5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu
6	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Bengkulu
7	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas II Arga Makmur
8	Balai Pemasarakatan Kelas II Bengkulu
9	Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu
10	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Bengkulu (LPKA)
11	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu wajib membuat laporan target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran

kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam mencapai target/sasaran kerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu secara berkelanjutan.

D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

NO	ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
DIVISI ADMINISTRASI		
1.	Kinerja penyerapan anggaran satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bengkulu belum sesuai <i>disbursement plan</i> .	Monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan dalam <i>disbursement plan</i> .
2.	Laporan kinerja melalui aplikasi SMART, E-Monev, dan E-Performance belum terlaksana secara optimal.	Sosialisasi terkait aplikasi SMART, E-Monev, dan E-Performance terutama dalam ketepatan waktu pengisian.
3.	Kurang pemahaman Divisi – Divisi dan Satuan Kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan tahun 2019 (untuk SPIP)	Perlu diselenggarakan lagi sosialisasi tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan tahun 2019 (untuk SPIP)
4.	Kurangnya pemahaman Satuan Kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu tentang hal – hal yang perlu disiapkan dan dilaksanakan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM	Perlu menambah kegiatan bintorwasdal dan / atau pendampingan kepada Satuan kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM
5.	Kurangnya anggaran untuk pembuatan spanduk, banner dan poster serta video profile, karena seringkali ada acara yang pelaksanaannya diluar kegiatan rutin tahunan biasanya, yang sifatnya mendadak.	Perlu menambah anggaran untuk biaya pembuatan spanduk, banner dan poster serta video profile
6.	Satker yang mendapat tambahan anggaran tidak melaporkan ke Kanwil sehingga apabila ada perubahan rencana kebutuhan anggaran harus dilakukan revisi	Menyampaikan secara langsung kepada satker agar berkoordinasi dengan Kanwil setiap melakukan tindakan yang berpengaruh terhadap perubahan laporan Keuangan maupun BMN.
7.	Pergantian operator baru pada Satker yang mengakibatkan sebagian tugas dan fungsi menjadi lambat untuk	Menyampaikan kepada satker agar pengkaderan bidang administrasi Keuangan dan BMN tidak secara

	menindaklanjuti pemutakhiran data secara cepat dan akurat	serta merta namun secara bertahap.
9.	Pemeliharaan Keperluan Rumah Tangga: RKAKL yang diusulkan realisasinya tidak sesuai sehingga pemeliharaan tidak maksimal.	Agar pemeliharaan dapat maksimal, telah diusulkan kembali nilai anggaran yang baru untuk pemeliharaan kendaraan dinas pada tahun anggaran mendatang
DIVISI PEMASYARAKATAN		
10.	Penentuan klasifikasi narapidana untuk penempatan dalam kategori Lapas Minimum, Lapas Medium, Lapas Maksimum dan Lapas Super Maksimum Security belum bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum adanya pedoman dalam penentuan kategori klasifikasi tersebut. Selain hal tersebut diatas, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan juga belum bisa dilaksanakan, dikarenakan hingga saat ini sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang penunjukkan kategori Lapas belum bisa diterapkan dalam waktu dekat dikarenakan Lapas-Lapas yang telah ditunjuk belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.	Memerintahkan Lapas dan Rutan untuk melakukan koordinasi dengan Bapas wilayah terdekat agar dilakukan assessmen dan litmas sementara sambil menunggu pedoman assessmen terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
11.	Sering terlambatnya penyampaian Laporan bulanan dari UPT.	Pengambilan data pendukung dilakukan Via Email, sehingga pelaksanaan tugas dapat selesai secara tepat waktu.
12.	Untuk usulan pembebasan bersyarat yang telah dikirim tidak terpantau	Terciptanya Koordinasi yang baik dengan UPT dalam memantau Usulan PB, CMB dan CB, sehingga usulan dapat terlaksana tepat waktu.
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM		
13.	Kurangnya Anggaran Pengawasan MPWN ke MPDN	Diharapkan mendapatkan Penambahan Anggaran Pengawasan MPWN ke MPDN
14.	Kurangnya Sarana & Prasarana bagi	Penambahan Anggaran untuk

	MPDN	penyediaan sarana & prasarana bagi MPDN
15.	Sebaran OBH dan advokat belum ideal dibandingkan jumlah penduduk dan letak geografis Propinsi Bengkulu sehingga paralegal dibutuhkan.	Sinergitas OBH dengan instansi terkait/Penegak Hukum, OBH yang belum terakreditasi, Pemerintah Daerah, LSM/NGO, Universitas dan lain – lain untuk memperlancar dan memperluas Jangkauan Penanganan Kasus.
16.	Proses pencairan anggaran dan proses verifikasi berkas permohonan bantuan hukum kurang sinergi, dikarenakan dalam proses pencairan anggaran melibatkan koordinasi dengan Pimti selaku penandatanganan berkas permohonan ke KPPN, yang tidak senantiasa berada di tempat tugas (Kantor Wilayah) karena agenda kegiatan diluar Kantor Wilayah	Optimalisasi pengajuan berkas permohonan pencairan anggaran (koordinasi dengan Bendahara)
17.	Sarana dan Prasarana <i>Law Center</i> kurang memadai sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas	Penambahan Anggaran untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana
18.	Sarana prasarana penunjang Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dirasakan sangat kurang dan belum memadai terutama dalam upaya penyebaran infomasi hukum kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan yang menggunakan media, elektronik, kamera digital, handy cam maupun sarana komunikasi publik lainnya seperti alat peraga, internet, audio visual/infocus, brosur, banner dan baliho.	Optimaliasasi Anggaran yang ada dan Memaksimalkan SDM yang ada untuk upaya penyebaran Informasi Hukum
19.	Minimnya sarpras terutama kendaraan roda 4 untuk optimalisasi koordinasi	Menggunakan kendaraan umum online dan meningkatkan

	baik dibidang pelayanan Yankomas maupun dalam koordinasi Pengumpulan data KabKota Peduli HAM	koordinasi antar bidang dan antar divisi untuk pinjam kendaraan
20.	Kurangnya SDM pada Subbidang Pelayanan KI terutama pada petugas pelayanan pendaftaran Kekayaan Intelektual.	Diperlukan perbantuan pegawai sebagai petugas pelayanan pendaftaran KI
21.	Belum adanya keseragaman pada setiap pemerintahan daerah terkait kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah.
22	Secara Geografis wilayah Bengkulu yang memiliki akses sangat jauh antara kabupaten dengan kota, membuat beberapa Penerima Bantuan Hukum di wilayah jauh dari pusat ibukota Propinsi sulit mengakses bantuan hukum.	OBH perlu lebih aktif untuk "Jemput Bola" untuk mendampingi klien miskin di UPT (Posbakum PAS).
DIVISI KEIMIGRASIAN		
21.	Kesiapan sarana dan prasarana belum mendukung untuk mendukung WBK/WBBM pada Kanim	Melakukan Renovasi Kantor untuk mendukung sarana dan prasarana lebih baik untuk mendukung WBK/WBBM
22.	Untuk menyimpan arsip data dokumen WNA / WNI diperlukan lemari arsip, sedangkan beberapa lemari arsip yang ada sudah tidak layak dipakai. Sehingga perlu diadakan pengadaan beberapa lemari arsip untuk menyimpan data dan dokumen.	Pengadaan lemari untuk menyimpan data dan dokumen

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu merupakan Instansi vertikal sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Sebagian kegiatannya berupa Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Unit Pemasyarakatan, Unit Imigrasi serta kegiatan Administrasi serta Pelayanan Jasa Hukum dan HAM di Wilayah Bengkulu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019 telah dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yakni:

Visi

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Misi

PENGAYOMAN

Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;

Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;

Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;

Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;

Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Dan nilai Kementerian “PASTI” yakni; Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan Inovatif. Relevan dengan visi dan misi dimaksud, sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjabaran Visi dan Misi serta nilai PASTI

tersebut, tentu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sebagai garda terdepan pencapaian sasaran strategis kementerian.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu unit kerja/ satuan kerja mandiri berusaha mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut. Berikut ini ialah sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- + Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi;
- + Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- + Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjarkpol baik ditingkat nasional, propinsi maupun di kabupaten kota;
- + Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;
- + Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik;
- + Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
- + Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin;
- + Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN HAM);
- + Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- + Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut sesuai dengan perubahan tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan HAM RI. Sementara itu, Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 adalah penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk :

- ✚ Menciptakan supremasi hukum;
- ✚ Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia;
- ✚ Memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
- ✚ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu adalah mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- ✚ Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
- ✚ Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- ✚ Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi;
- ✚ Memiliki orientasi kepada masa depan;
- ✚ Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi;
- ✚ Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (core bussines) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- ✚ Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- ✚ Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- ✚ Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- ✚ Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- ✚ Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
- ✚ Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Untuk membentuk dan merubah perilaku dan pola pikir perlu ditetapkan nilai nilai yang menjadi Budaya Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkinerja produktif melalui "PASTI" yang mempunyai makna :

Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Pada tahun 2019, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu melaksanakan kegiatan dengan 9 (sembilan) DIPA. Untuk merealisasikan 9 (sembilan) DIPA tersebut, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Hukum dan HAM;
2. Program Administrasi Hukum Umum, Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah;
3. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan, Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah;
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian, Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah;

5. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Kekayaan di Kantor Wilayah;
6. Program Pembentukan Hukum, Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah;
7. Program Pemajuan Hak Asasi Manusia, Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah;
8. Prgram Pembinaan Hukum Nasional, Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah;
9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah.

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tersebut masih berisikan perencanaan global dengan penjabaran hanya sampai kepada program, oleh sebab itu diperlukan operasionalisasi dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan. Adapun Rencana Kinerja/ kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Divisi Pemasarakatan

Penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah untuk merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah, Divisi Pemasarakatan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi Bintorwasdal terhadap UPT PAS;
2. Menerima usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) dari LAPAS/RUTAN;
3. Menerima laporan berkala dari UPT;
4. Menerima usulan remisi dari LAPAS/RUTAN;
5. Monitoring Sistem Database Pemasarakatan (SDP);
6. Melaksanakan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib) secara terjadwal dan insidental di seluruh UPT PAS;
7. Pengarsipan data Divisi Pemasarakatan.

2. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia;
2. Penyelenggaraan pelayanan jasa hukum di bidang notariat;
3. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang kewarganegaraan;
4. Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia;
5. Hasil kasijan hak asasi manusia;
6. Dokumen permohonan HKI yang diterima Kantor Wilayah;
7. Promosi dan diseminasi di daerah;
8. Penegakan hukum di daerah;
9. Database kekayaan intelektual komunal.
10. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah;
11. Pembinaan perancan peraturan perundang – undangan di daerah;
12. Pembinaan perancang peraturan perundangan – undangan di daerah;
13. Penelitian dan pengembangan sistem hukum di daerah;
14. Dokumentasi dan jaringan informasi hukum di daerah;
15. Kesadaran hukum masyarakat daerah;
16. Orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum.

3. Divisi Imigrasi

Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian. Untuk merealisasikan kegiatan Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian, Divisi Keimigrasian melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen RKA-K/L fungsi Keimigrasian;
2. Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian;
3. Pembinaan Koordinasi dan konsultasi program kegiatan;
4. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi bidang intelijen, penindakan, informasi dan sarana komunikasi Keimigrasian;
5. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi bidang lalu lintas dan izin tinggal Keimigrasian.

4. Divisi Administrasi

1. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor wilayah;
2. Layanan keuangan Kanwil Kemenkumham;
3. Layanan penata usahaan BMN Kanwil Kemenkumham;
4. Layanan kepegawaian Kanwil Kemenkumham;
5. Layanan kehumasan Kanwil Kemenkumham;
6. Layanan perkantoran;
7. Peralatan dan fasilitas perkantoran;
8. Gedung/ bangunan.
9. Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Target / sasaran kinerja yang tertuang dala DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2019 merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi yang dicapai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Formulasi target kinerja tersebut memungkinkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk menyusun Perencanaan Kinerja, yaitu merencanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Selain itu, proses penyusunan Perencanaan Kinerja juga harus mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan tolak ukur dasar penilaian kinerja kegiatan. Perencanaan kinerja kan disusun dalam suatu dokumen rencana kerja, program kerja dan kalender kerja serta dokumen disbursement plan. Perencanaan Kinerja yang telah terpetakan dengan jelas akan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Berikut akan dijabarkan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Setiap Divisi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

1 Divisi Administrasi

A. Perencanaan Kinerja

Divisi Administrasi sebagai divisi yang memiliki fungsi pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah. Sesuai Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-013.01.2.401975/2019, program ini menetapkan sasaran kegiatannya pada tersedianya layanan pengelolaan administratif dan fasilitatif kantor wilayah. Berikut Komponen kegiatan dan PAGU anggaran Tahun 2019 Divisi Administrasi yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	051. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	239.600.000
2.	052. Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi	69.490.000
3.	053. Pengelolaan Data dan Informasi	6.300.000
4.	054. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	133.665.000
5.	055. Pengelolaan Kepegawaian	120.895.000
6.	056. Pelayanan Umum dan Perlengkapan	45.100.000
7.	057. Pelayanan Humas dan Protokol	81.540.000
8.	058. Reformasi Birokrasi di Wilayah	43.500.000
9.	001. Gaji dan Tunjangan	9.572.385.000
10.	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.695.327.000
	TOTAL	Rp. 13.007.802.000

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai Perencanaan Kinerja Divisi Administrasi di tahun 2019 tersebut diatas dan DIPA Nomor DIPA-013.01.2.409175/2019, disusunlah Perjanjian Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2019, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
DIVISI ADMINISTRASI			
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan 2. Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu 3. Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel 4. Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan 5. Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel 6. Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat	1 Layanan
2.	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan :

- Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja : Rp. 740.090.000,-
- Layanan Perkantoran : Rp. 12.267.712.000,-

Jumlah Anggaran : **Rp. 13.007.802.000,-**

2. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

A. Perencanaan Kinerja

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM merupakan divisi yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya. Sesuai tusi yang diemban, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan 6 (enam) program, Berikut program, DIPA dan sasaran kegiatan setiap program pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada tahun 2019 :

NO.	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
1.	Program Administrasi Hukum Umum	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah yang efektif.
2.	Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah.
3.	Program Pembentukan Hukum	1. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah; 2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.
4.	Program Pemajuan Hak Asasi Manusia	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM; 2. Jumlah layanan HAM di wilayah.
5.	Program Pembinaan Hukum Nasional	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah
6.	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian hukum dan HAM	1. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM; 2. Sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah.

Untuk mencapai sasaran kegiatan keenam program tersebut, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada tahun 2019 menyusun perencanaan kegiatan sesuai DIPA. Berikut Komponen kegiatan dan PAGU anggaran Tahun 2019 Divisi Administrasi yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Program Administrasi Hukum Umum

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	051. Digitalisasi arsip layanan fidusia	25.534.000
2.	052. Advokasi	300.000
3.	053. Sosialisasi Layanan Fidusia	376.335.000
4.	051. Pelantikan Notaris	13.200.000
5.	052. Sosialisasi Layanan Kenotariatan	63.114.000
6.	051. Pelantikan PPNS	17.600.000
7.	052. Sosialisasi Layanan AHU Lainnya	54.730.000
8.	051. Koordinasi dengan Instansi Lain	59.460.000
9.	052. Kordinasi dengan Unit Pusat	302.197.000
10.	053.Pemantauan/Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	69.800.000
11.	051. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	38.840.000
12.	052. Tim Evaluasi dan Investigasi Notaris	49.700.000
13.	053. Majelis Pengawas Wilayah Notaris	117.940.000
14.	054. Majelis Pengawas Daerah Notaris	137.160.000
15.	051. Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum	44.606.000
16.	052. Penyediaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah	468.514.000
	TOTAL	1.900.000.000

Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	051. Penyelesaian Permohonan HKI Sesuai dengan Peraturan	54.085.000
2.	052. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	44.600.000
3.	053. Penyediaan Data Kekayaan Intelektual Komunal	6.000.000
4.	051. Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah	30.300.000
5.	052. Pengaduan Pelanggaran HKI di Kanwil	2.200.000
6.	053. Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar	15.872.000
	TOTAL	153.057.000

Program Pembentukan Hukum

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	051. Melakukan fasilitasi harmonisasi perancangan peraturan daerah	67.071.000
2.	052. Menginventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan perda/raperda	12.734.000
3.	055. Menyusun perencanaan kegiatan fasilitasi produk hukum daerah	19.320.000
4.	051. Melakukan Penilaian Angka Kredit Perancang	2.925.000
5.	052. Melaksanakan Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah	11.000.000
6.	053. Meningkatkan kompetensi pembentukan peraturan daerah	28.680.000
	TOTAL	141.730.000

Program Pemajuan HAM

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	051. Persiapan Diseminasi HAM Kab/Kota	7.878.000
2.	052. Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota	29.615.000
3.	053. Pelaporan Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota	250.000
4.	051. konsultasi teknis penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah	5.305.000
5.	052. konsultasi teknis penyelenggaraan pemajuan HAM ke Pusat	41.650.000
6.	051. Inventarisasi dan Identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah (Kab/kota dan Provinsi)	5.540.000
7.	052. FGD Evaluasi Rancangan Produk hukum daerah Kab/kota dari perspektif HAM	13.940.000
8.	053. Telaahan dan rekomendasi Rancangan Produk hukum daerah	7.160.000
9.	051. Penelaahan Komunikasi Masyarakat	3.400.000
10.	052. Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat	22.260.000
11.	053. Penyusunan Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat di wilayah	9.860.000
12.	051. Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	27.230.000
13.	052. Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	25.589.000
14.	051. Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kab/Kota Peduli HAM	11.725.000
15.	52. Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM	27.582.000
	TOTAL	238.984.000

Program Pembinaan Hukum Nasional

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	051. Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa	1.131.000.000
2.	052. Konseling dan Dokumen Hukum	517.200.000
3.	051. Pemantauan dan Evaluasi Oleh Panitia Pengawas Daerah	8.240.000
4.	052. Menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	58.793.000
5.	051. Melaksanakan Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum	24.922.000
6.	052. Melakukan Pembinaan /Pembentukan Kelompok Kadarkum Dan Peresmian Desa/Kelurahan Dan Sekolah Sadar Hukum	35.390.000
7.	051. Memberikan Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik	114.610.000
8.	052. Melakukan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum	32.545.000
9.	052. Melakukan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum	55.069.000
10.	051. Melakukan Penyusunan Database Peraturan Perundang-undangan	7.200.000
11.	052. Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitas Pengelolaan JDIH/Perpustakaan Hukum	80.414.000
13.	051. Melakukan Persiapan dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	2.018.000

14.	052. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	23.582.000
	TOTAL	2.090.983.000

 **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM**

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	052. Melaksanakan pengkajian hak asasi manusia di wilayah	23.630.000
2.	053. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah	15.350.000
	TOTAL	38.980.000

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan perencanaan kinerja kegiatan dan DIPA TA. 2019 pada masing-masing program, maka Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyusun Perjanjian Kinerja TA. 2019 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Administrasi Hukum Umum			
1.	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	13 Dokumen
2.	Layanan MKNW, MPW, dan MPD Notaris	Terselenggaranya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris	12 Bulan Layanan
3.	Dukungan Layanan AHU di Wilayah	Terlaksananya dukungan pelaksanaan program Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1 Dokumen

Dalam upaya mencapai target kinerja dan sasaran kegiatannya, Program Administrasi Hukum Umum memiliki kekuatan anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Kekayaan Intelektual			
1.	Layanan HKI di Daerah	1. Persentase penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Jumlah Permohonan HKI yang diajukan melalui Kanwil 3. Jumlah KI Komunal yang diinventarisasi	18 Jumlah Permohonan

2.	Penegakan Hukum di Daerah	Terselenggaranya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris	1 Jumlah Kasus
----	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Demi terselenggaranya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, pada tahun anggaran 2019, Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual memiliki anggaran sebesar Rp. 153.057.000 ,-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pembentukan Hukum			
1.	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	40 Raperda
2.	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	30 Orang

Pelaksanaan Program Pembentukan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu memiliki anggaran sebesar Rp. 141.730.000,-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pemajuan HAM			
1.	Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	25.000 Layanan
2.	Pengembangan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan aksi HAM Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2 Pemda

Pelaksanaan Program Pemajuan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu memiliki anggaran sebesar Rp. Rp. 238.984.000,-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pembinaan Hukum Nasional			
1.	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	148 Orang/Kasus
2.	Kegiatan Bantuan Hukum dan non Litigasi	Jumlah Kegiatan Bantuan non Litigasi kepada orang atau kelompok Masyarakat miskin	66 Kegiatan
3.	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
4.	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan sadar Hukum di Daerah	Jumlah Penyuluh hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah

5.	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
6.	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui Sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah
7.	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	Terselenggaranya pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50 Kantor Wilayah

Dalam rangka terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah, Program Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu memiliki anggaran sebesar Rp. 1.789.263.000,-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM			
1.	Layanan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia Hasil penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Layanan

Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu memiliki anggaran sebesar Rp. 38.980.000,-

3. Divisi Keimigrasian

A. Perencanaan Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, mengamanatkan Divisi Keimigrasian memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Keimigrasian melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-013.06.2.409172/2019, dimana sasaran kegiatannya difokuskan pada pembinaan dan pengawasan UPT imigrasi. Berikut Komponen kegiatan dan PAGU anggaran Tahun 2019 Divisi Keimigrasian yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	051. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Fasilitatif Fungsi Keimigrasian	261.806.000
2.	052. Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian	254.060.000
	TOTAL	515.866.000

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai Perencanaan Kinerja Divisi Keimigrasian dan DIPA TA. 2019 tersebut diatas, disusunlah Perjanjian Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2019, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pemajuan HAM			
1.	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	24 Kegiatan

Untuk mencapai sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan UPT imigrasi tahun 2019, Divisi Keimigrasian memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 515.866.000,-

4. Divisi Pemasyarakatan

A. Perencanaan Kinerja

Sebagai divisi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah, Divisi Pemasyarakatan menjalankan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah. Sesuai Tusi yang diemban Divisi Pemasyarakatan dan Daftar Isian Pelaksanaan Petikan (DIPA) Nomor DIPA-013.05.2.409171/2019, fokus utama sasaran kegiatan Divisi Pemasyarakatan adalah meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah. Berikut Komponen kegiatan dan PAGU anggaran Tahun 2019 Divisi Pemasyarakatan yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

NO.	KOMPONEN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	051. Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban	15.600.000
2.	052. Pembinaan Layanan WBP	7.700.000
3.	053. Layanan Kerjasama, Komunikasi dan Informasi	50.575.000
4.	051. Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Bengkulu	40.458.000
5.	052. Konsultasi Teknis Pemasyarakatan	156.972.000
6.	053. Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	65.600.000
7.	054. Pengendalian UPT Pemasyarakatan	186.491.000
8.	051. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum (Peran Serta Masyarakat)	59.080.000
	TOTAL	582.476.000

B. Perjanjian Kinerja

Melalui Perencanaan Kinerja Kegiatan yang disesuaikan dengan Petikan DIPA Nomor DIPA-013.05.2.409171/2019, Divisi Pemasyarakatan menyusun Perjanjian Kinerjanya sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Divisi Pemasyarakatan			
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	10 UPT

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sarsaran kegiatan Divisi Pemasyarakatan di tahun 2019 adalah Rp. 582.476.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

LKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun Anggaran 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Bengkulu yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut. Adapun capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh setiap divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas membantu kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Selama periode Tahun 2019 Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja satu tahun anggaran tersebut, berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan:

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1.	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.		
	Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran	Aula Kanwil Kemenkumham Bengkulu, 27 Februari 2019	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kerja, Percepatan Anggaran dan Analisa Kebutuhan TA. 2020 rapat koordinasi ini difokuskan pada penyusunan dokumen / matrik analisa kebutuhan anggaran tahun 2020 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA. 2020 yang menampung seluruh kebutuhan belanja riil dan anggaran kegiatan/program skala prioritas seluruh Satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bengkulu serta memberikan pemahaman kepada KPA, PPK, dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019. Melalui kegiatan ini dihasilkan dokumen usulan awal RKAKL TA. 2020 pada 9 program, usulan postur, usulan kegiatan prioritas serta laporan kegiatan.
		Aula Kanwil Kemenkumham Bengkulu, 30 April 2019	Supervisi Aplikasi e-Monev Versi 3.0 TA. 2019 Tim Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui kegiatan ini memberikan arahan terkait penggunaan Aplikasi E-Monev yang dikembangkan oleh Bapenas sebagai aplikasi pemantauan pelaksanaan Renja-KL, dimana fokus pelaporannya pada data realisasi di level komponen. Pada aplikasi e-Monev, pelaporan oleh kementerian dilakukan setiap triwulan dengan cara melakukan verifikasi data yang sudah di input oleh satker dan unit kerja. Biro perencanaan sebagai wakil dari kementerian mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi data yang sudah di input di aplikasi e-Monev. Data yang diverifikasi akan menjadi laporan resmi dari kementerian
	Koordinasi, Konsultasi Dan Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran	Tinjau Lokasi Pembangunan LPKA Bengkulu, 29 Juli 2019	Peninjauan lokasi pembangunan ini dalam rangka persiapan Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Juli 2019. Kepala Divisi Administrasi, Garnadi memberikan arahan terkait persiapan Peletakan Batu Pertama agar dipersiapkan dengan baik sesuai dengan Rounddown Acara yang telah disetujui oleh Kakanwil Kemenkumham Bengkulu.

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
	Monitoring Penyusunan Program, Pelaporan dan Kehumasan	Aula Kanwil Kemenkumham Bengkulu, 14 Februari 2019	Melalui Teleconference dilakukan pembinaan dan pelatihan terkait penyusunan Laporan keuangan.`
2.	Pelaporan dan Tata Laksana		
	Rapat Pelaksanaan Target Kinerja	Aula Kanwil Kemenkumham Bengkulu, 20 Februari 2019	Rapat Koordinasi Penyusunan Target Kinerja B.03 Tahun 2019 Rapat koordinasi ini merupakan bentuk manajemen kinerja dan merupakan bentuk koordinasi secara internal yang secara rutin dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, Peserta kegiatan rapat koordinasi dapat mengetahui data dukung yang harus dipenuhi dalam target kinerja yang harus dipenuhi pada bulan ketiga (B03) Tahun 2019 sehingga dapat mempersiapkan data dukung yang dimaksud agar dapat melakukan pelaporan monitoring kinerja tepat waktu.
		Aula Kanwil Kemenkumham Bengkulu, 22 Mei 2019	Bertempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dilaksanakan rapat Evaluasi Capaian Target Kinerja B03 Tahun 2019 serta Progres dan Persiapan Target Kinerja B06 Tahun 2019. Rapat kali ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi (Garnadi), Kepala Divisi Imigrasi (Esti Winahyu Nurhandayani), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Pujo Harinto), Para Pejabat Eselon III dan IV, JFT serta Fungsional Umum. Berdasarkan hasil evaluasi target kinerja B03 Kanwil Kemenkumham Bengkulu mendapatkan hasil yang memuaskan, tetapi untuk hasil yang lebih sempurna ketelitian merupakan hal yang harus ditingkatkan kembali.
3.	Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar		
		Januari 2019	Kanim Kelas I TPI Bengkulu berikan Layanan Paspur Simpatik dalam rangka peringatan Hari Bakti Imigrasi Ke 69 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanim-kelas-i-tpi-bengkulu-berikan-layanan-paspor-simpatik-dalam-rangka-peringatan-hari-bakti-imigrasi-ke-69

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			<p>Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja tahun 2019</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/apel-komitmen-pelaksanaan-janji-kinerja-tahun-2019</p>
			<p>PELAKSANAAN TELECOFRENCE DAN APLIKASI ZOOM DI TINGKAT UPT JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pelaksanaan-telecofrence-dan-aplikasi-zoom-di-tingkat-upt-jajaran-kanwil-kemenkumham-bengkulu</p>
			<p>MEMBEDAH KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2019</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/membedah-kinerja-divisi-pelayanan-hukum-dan-ham-tahun-2019</p>
			<p>KAKANWIL IMBAU KADIVPAS TEKANKAN REVITALISASI DI SEGALA LINI JAJARAN PEMASYARAKATAN</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-imbau-kadivpas-tekankan-revitalisasi-di-segala-lini-jajaran-pemasyarakatan</p>
			<p>SEBAGAI SARANA PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DI LAPAS DAN RUTAN, POLDA SERAHKAN SENJATA API KE KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sebagai-sarana-penunjang-pelaksanaan-tugas-di-lapas-dan-rutan-polda-serahkan-senjata-api-ke-kanwil-kemenkumham-bengkulu</p>
			<p>KEGIATAN AUDIENSI DALAM MEMBANGUN SINERGITAS DAN KOLABORASI ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU DENGAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kegiatan-audiensi-dalam-membangun-sinergitas-dan-kolaborasi-antara-kantor-wilayah-kementerian-hukum-dan-ham-bengkulu-dengan-bupati-kabupaten-bengkulu-utara</p>

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			<p>MEMPERERAT SILATURAHMI ANGGOTA PIPAS WILAYAH BENGKULU RAMAIKAN LAPAS ARGAMAKMUR PAGI TADI</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/mempererat-silaturahmi-anggota-pipas-wilayah-bengkulu-ramaikan-lapas-argamakmur-pagi-tadi</p>
			<p>PANTAU BLOK HUNIAN DAN SARANA DALAM LAPAS, KAKANWIL AKAN SERIUS LAKUKAN REVITALISASI JAJARAN PEMASYARAKATAN</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pantau-blok-hunian-dan-sarana-dalam-lapas-kakanwil-akan-serius-lakukan-revitalisasi-jajaran-pemasyarakatan</p>
			<p>APEL PAGI RUTIN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/apel-pagi-rutin-kantor-wilayah-kementerian-hukum-dan-ham-bengkulu</p>
			<p>ILHAM DJAYA BERHARAP OJK DAPAT MENGUATKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN KEMAMPUAN LITERASI MASYARAKAT SAAT PELANTIKAN KEPALA OJK YANG BARU</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/ilham-djaya-berharap-ojk-dapat-menguatkan-fungsi-pengawasan-dan-kemampuan-literasi-masyarakat-saat-pelantikan-kepala-ojk-yang-baru</p>
			<p>RAPAT BEDAH KINERJA JAJARAN KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU TAHUN 2019</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-bedah-kinerja-jajaran-keimigrasian-kanwil-kemenkumham-bengkulu-tahun-2019</p>
			<p>TINGKATKAN SINERGITAS DAN KOLABORASI, ILHAM DJAYA SAMBANGI KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/tingkatkan-sinergitas-dan-kolaborasi-ilham-djaya-sambang-ketua-pengadilan-tinggi-bengkulu</p>
			<p>Pemantauan Pengamanan Tahun Baru 2019</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-</p>

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			kanwil/berita-utama/pemantauan-pengamanan-tahun-baru-2019
			Tatap muka bersama 12 CPNS Dan 4 ASN jajaran KEMENKUMHAM https://bengkulu.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/tatap-muka-bersama-12-cpns-dan-4-asn-jajaran-kemenumham
			koordinasi dan pembinaan di SMAN 4 KOTA Bengkulu https://bengkulu.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/koordinasi-dan-pembinaan-di-sman-4-kota-bengkulu
			Rapat membedah kinerja jajaran Divisi Administrasi Tahun 2019 https://bengkulu.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-membedah-kinerja-jajaran-divisi-administrasi-tahun-2019
			Press Conference Kanim Klas I TPI Bengkulu Terkait Pengamanan WNA https://bengkulu.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/press-conference
			koordinasi dengan Pemda Kabupaten Seluma https://bengkulu.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/koordinasi-dengan-pemda-kabupaten-seluma
			Apel Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2019, Kanwil Kemenkumham Bengkulu https://bengkulu.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/apel-deklarasi-janji-kinerja
			Pengukuhan Komunitas Pemuda Pelajar Pegiat Hak Asasi Manusia (Koppeta HAM) dan Duta HAM SMA Provinsi Bengkulu https://bengkulu.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pengukuhan-komunitas-pemuda-pelajar-pegiat-hak-asasi-manusia-koppeta-ham-dan-duta-ham-sma-provinsi-bengkulu
			Memantau Langsung Kegiatan Tes Urine Petugas di LPP https://bengkulu.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/memantau-langsung-kegiatan-tes-urine
			RDK "PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM KANIM KLAS I TPI BENGKULU TAHUN 2019"

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sosialisasi-ke-unit-pelaksana-teknis-upt-di-jajarannya
			Sambangi Ruang Kerja Kepala Dinas Ketenagaerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu (Sudoto) di DISNAKERTRANS Provinsi Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sambangi-ruang-kerja-kepala-dinas-ketenagaerjaan-dan-trasnigrasi-provinsi-bengkulu-sudoto-di-disnakertrans-provinsi-bengkulu
			Rapat Persiapan Koordinasi Pengelolaan JDIIH dan Perpustakaan Hukum https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-persiapan-koordinasi-pengelolaan-jdih-dan-perpustakaan-hukum
			Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penghapusan BMN https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sosialisasi-pelaksanaan-kegiatan-percepatan-penghapusan-bmn
			Kakanwil Bersama KadivyanKUMHAM Menyambut Kedatangan Dirjen HAM di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-bersama-kadivyanKUMHAM-menyambut-kedatangan-dirjen-ham-di-bandara-fatmawati-soekarno-bengkulu
			Dirjen HAM Bersama Kakanwil Pantau Layanan Berbasis HAM di Kantor Imigrasi Klas I TPI Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/dirjen-ham-bersama-kakanwil-pantau-layanan-berbasis-ham-di-kantor-imigrasi-kelas-i-tpi-bengkulu
		Februari 2019	Kakanwil Sambangi Gubernur terkait Undangan Penerimaan Penghargaan Menkumham RI https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-sambangi-gubernur-terkait-undangan-penerimaan-penghargaan-menkumham-ri
			Kunjungan Kerja Kadiv Administrasi Ke Lapas Perempuan Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			kanwil/berita-utama/kunjungan-kerja-kadiv-administrasi-ke-lapas-perempuan-bengkulu
			Sebanyak 32 Warga Binaan di Lembaga Masyarakatan (Lapas) Klas II A Curup mengikuti pelatihan kerja https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sebanyak-32-warga-binaan-di-lembaga-pemasyarakatan-lapas-klas-ii-a-curup-mengikuti-pelatihan-kerja
			Kepala Divisi Keimigrasian Berikan Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kepala-divisi-keimigrasian-berikan-pembinaan-pengendalian-dan-pemantauan-pembangunan-zi-menusu-wbk-dan-wbbm
			Rapat Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-evaluasi-dan-persiapan-pelaporan-capaian-pelaksanaan-aksi-ham
			ILHAM DJAYA KOMANDOI INSPEKSI MENDADAK DI LAPAS PEREMPUAN https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/ilham-djaya-komandoi-inspeksi-mendadak-di-lapas-perempuan
		Maret 2019	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Ilham Djaya serahkan sertifikat lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan Penyuluh Hukum Kepada an. Zabidin https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kepala-kantor-wilayah-kementerian-hukum-dan-ham-bengkulu-ilham-djaya-serahkan-sertifikat-lulus-uji-kompetensi-kenaikan-jenjang-jabatan-penyuluh-hukum-kepada-an-zabidin
			Kanwil Kemenkumham Bengkulu Adakan Rapat Persiapan Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Tahun 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanwil-kemenkumham-bengkulu-adakan-rapat-persiapan-lomba

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			kadarkum-tingkat-provinsi-tahun-2019
			Sosialisasi Pengisian Survei Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sosialisasi-pengisian-survei-internal-penilaian-mandiri-pelaksanaan-reformasi-birokrasi-2019
			KAKANWIL MOTIVASI CPNS BEKERJA BAIK, BERINTEGRITAS DAN PUNYA STRATEGI https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-motivasi-cpns-bekerja-baik-berintegritas-dan-punya-strategi
			Kepala LPKA Bengkulu Berikan Pengarahan Mengenai WBK dan WBBM kepada Seluruh Pegawai https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/optimalikan-pelayanan-jarak-jauh-dan-penerapan-uu-sppa
			Rapat Persiapan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Korupsi dan Survei Integritas atas Pelayanan Publik https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-persiapan-survei-kepuasan-masyarakat-survei-persepsi-korupsi-dan-survei-integritas-atas-pelayanan-publik
			Sambutan Hangat Untuk Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sambutan-hangat-untuk-staf-ahli-menteri-bidang-hubungan-antar-lembaga
			Kakanwil Sambangi Gubernur terkait Undangan Penerimaan Penghargaan Menkumham RI https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-sambangi-gubernur-terkait-undangan-penerimaan-penghargaan-menkumham-ri
		April 2019	Sambut Ramadhan, Kanwil Kemenkumham Bengkulu Adakan Ceramah Agama dan Do'a Bersama https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sambut-ramadhan-kanwil-kemenkumham-bengkulu-adakan-ceramah-agama-dan-do-a-bersama
			KEGIATAAN PENELAAHAN KOMUNIKASI

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			MASYARAKAT TERKAIT PENCABULAN DI DESA TALANG ALAI https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kegiatan-penelaahan-komunikasi-masyarakat-terkait-pencabulan-di-desa-talang-alai
			RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN ACTION PLAN PENINGKATAN NILAI IPK DAN MALL PELAYANAN PUBLIK https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-persiapan-penyusunan-action-plan-peningkatan-nilai-ipk-dan-mall-pelayanan-publik
			PENANDATANGAN KONTRAK KERJASAMA BANTUAN HUKUM BAGI ORANG ATAU KELOMPOK MISKIN ANTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENGAN OBH SE-PROVINSI BENGKULU https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penandatanganan-kontrak-kerjasama-bantuan-hukum-bagi-orang-atau-kelompok-miskin-antara-kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-dengan-obh-se
			Rapat Penyusunan Peta Permasalahan Hukum di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-penyusunan-peta-permasalahan-hukum-di-provinsi-bengkulu-tahun-2019
			SEKDA BENGKULU MENJADI INSPEKTUR UPACARA HARI BHAKTI PAS KE 55 TAHUN 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sekda-bengkulu-menjadi-inspektur-upacara-hari-bhakti-pas-ke-55-tahun-2019
			Teleconference Penelitian Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/teleconference-penelitian-karakteristik-narapidana-kasus-narkotika
			Supervisi Perawatan Kesehatan https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/supervisi-perawatan-kesehatan
			Supervisi Aplikasi E-Monev 3.0.

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/supervisi-aplikasi-e-monev-3-0
			Kakanwil Hadiri Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan agenda Pengucapan Sumpah Advokat https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-hadiri-sidang-terbuka-pengadilan-tinggi-bengkulu-dengan-agenda-pengucapan-sumpah-advokat
			Rapat dan Operasi Gabungan TIMPORA Kab. Bengkulu Tengah ke PT. Kusuma Raya Utama (Batu Bara) https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-dan-operasi-gabungan-timpora-kab-bengkulu-tengah-ke-pt-kusuma-raya-utama-batu-bara
			Bakti Sosial Peduli Banjir Kanwil Kemenkumham Bengkulu bersama BNI 46 Cabang Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/bakti-sosial-peduli-banjir-kanwil-kemenkumham-bengkulu-bersama-bni-46-cabang-bengkulu
		Mei 2019	Safari Ramadhan Spesial Bersama Gubernur di LPKA Klas II Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/safari-ramadhan-spesial-bersama-gubernur-di-lpka-klas-ii-bengkulu
			Divisi Keimigrasian gelar RDK Penguatan Pengawasan Orang Asing https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/divisi-keimigrasian-gelar-rdk-penguatan-pengawasan-orang-asing
			Rapat Koordinasi Strategis Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-koordinasi-strategis-implementasi-sistem-peradilan-pidana-terpadu-berbasis-teknologi-informasi
			OPEN BIDDING PENGISIAN JABATAN ESELON V SERTA USULAN PROMOSI ESELON III DAN IV DI JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			kanwil/berita-utama/open-bidding-pengisian-jabatan-eselon-v-serta-usulan-promosi-eselon-iii-dan-iv-di-jajaran-kanwil-kemenkumham-bengkulu
			Kolaborasi Apik demi Terwujudnya Generasi Sadar Hukum https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kolaborasi-apik-demi-terwujudnya-generasi-sadar-hukum
			Kunjungan Dari DPD RI Komisi I Ke Kanwil Kemenkumham Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kunjungan-dari-dpd-ri-komisi-i-ke-kanwil-kemenkumham-bengkulu
			Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sosialisasi-aplikasi-pelayanan-publik-berbasis-ham
			Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Ke-74 Kanwil Kemenkumham Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/upacara-peringatan-hari-lahir-pancasila-ke-74-kanwil-kemenkumham-bengkulu
		Juni 2019	Kantor wilayah kemenkumham bengkulu lakukan baperjakat https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kantor-wilayah-kemenkumham-bengkulu-lakukan-baperjakat
		Juli 2019	KEGIATAN PRA REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2019 KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kegiatan-pra-rekonsiliasi-data-laporan-keuangan-semester-1-tahun-anggaran-2019-kanwil-kemenkumham-bengkulu
			BLK Berikan Pelatihan, WBP LPP Menjadi Cantik! https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/blk-berikan-pelatihan-wbp-lpp-menjadi-cantik
			Semangat Menyambut HUT RI ke-74, Pegawai dan WBP Nampak Kompak! https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/semangat-menyambut-hut-ri-ke-74-pegawai-dan-wbp-nampak-kompak

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			RAPAT PERSIAPAN PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN LPKA BENGKULU DAN MOU DENGAN UMB DAN BNI https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-persiapan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-lpka-bengkulu-dan-mou-dengan-umb-dan-bni
			KADIVMIN TINJAU LOKASI PEMBANGUNAN LPKA UNTUK PERSIAPAN PELATAKAN BATU PERTAMA https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kadivmin-tinjau-lokasi-pembangunan-lpka-untuk-persiapan-pelatakan-batu-pertama
			Batu Pertama untuk Andik Pemasarakatan https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/batu-pertama-untuk-andik-pemasyarakat
			RAPAT KOORDINASI DENGAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-koordinasi-dengan-organisasi-bantuan-hukum
		Agustus 2019	Rapat Penguatan Tupoksi Kepegawaian oleh Kakanwil https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-penguatan-tupoksi-kepegawaian-oleh-kakanwil
			Kolaborasi Kanwil Kemenkumham Bengkulu, UMB dan BNI dalam Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kolaborasi-kanwil-kemenkumham-bengkulu-umb-dan-bni-dalam-peningkatan-pendidikan-bagi-pegawai
		September 2019	YASONNA H. LAOLY DIKUKUHKAN SEBAGAI GURU BESAR STIK-PTIK https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/yasonna-h-laoly-dikukuhkan-sebagai-guru-besar-stik-ptik
			KOORDINASI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PENDAFTARAN MEREK UMKM DARI BAGIAN EKONOMI PEMERINTAH DAERAH SELUMA https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			kanwil/berita-utama/koordinasi-pendaftaran-indikasi-geografis-dan-pendaftaran-merek-umkm-dari-bagian-ekonomi-pemerintah-daerah-seluma
			KAKANWIL DAN PARA KEPALA DIVISI MENGIKUTI VICON PERMENKUMHAM NO. 16 TAHUN 2019 DAN PENGUNAAN APLIKASI SI PaSTIKU https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-dan-para-kepala-divisi-mengikuti-vicon-permenkumham-no-16-tahun-2019-dan-penggunaan-aplikasi-si-pastiku
		Oktober 2019	KAKANWIL MELAKUKAN PEMANTAUAN LAYANAN AHU DI SELUMA https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-melakukan-pemantauan-layanan-ahu-di-seluma
			Perlindungan Usaha berbasis Kekayaan Intelektual https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-usaha-berbasis-kekayaan-intelektual
			Pelayanan Prima Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pelayanan-prima-pendaftaran-hak-kekayaan-intelektual-kanwil-kemenkumham-bengkulu
		November 2019	KEGIATAN RAKERNIS PELAYANAN K.I. BAGI KANTOR WILAYAH (KANWIL) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KEMENKUMHAM) https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kegiatan-rakernis-pelayanan-k-i-bagi-kantor-wilayah-kanwil-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia-kemenkumham
			Peringatan Hari Korpri ke-48, Kadivpas Ingin Pegawai Laksanakan Pesan Presiden https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/peringatan-hari-korpri-ke-48-kadivpas-ingin-pegawai-laksanakan-pesan-presiden
			RAPAT PERSIAPAN KUNJUNGAN KOMISI III DPR RI https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-persiapan-kunjungan-

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			komisi-iii-dpr-ri
			PEMUSNAHAN ARSIP KANIM KELAS I TPI BENGKULU TAHUN 2007-2013 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pemusnahan-arsip-kanim-kelas-i-tpi-bengkulu-tahun-2007-2014
			RAPAT OPTIMALISASI ANGGARAN PENERIMAAN CPNS 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-optimalisasi-anggaran-penerimaan-cpns-2019
			Kakanwil, Abdul Hany Terima DIPA 2020 dari Gubernur Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-abdul-hany-terima-dipa-2020-dari-gubernur-bengkulu
			KADIVPAS SAMPAIKAN SOSIALISASI TERKAIT NILAI PASTI CORPORATE UNIVERSITY DAN ACTION PLAN KEPADA KUPT PEMASYARAKATAN SE-BENGKULU https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kadivpas-sampaikan-sosialisasi-terkait-nilai-pasti-corporate-university-dan-action-plan-kepada-kupt-pemasyarakatan-se-bengkulu
			KOORDINASI LANJUTAN TERKAIT TANAH HIBAH LPKA KELAS II BENGKULU https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/koordinasi-lanjutan-terkait-tanah-hibah-lpka-kelas-ii-bengkulu
			Kunjungan Wisata SD Insan Kamil Islamic School Ke Kanwil Kemenkumham Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kunjungan-wisata-sd-insan-kamil-islamic-school-ke-kanwil-kemenkumham-bengkulu
			Kunjungan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional ke Provinsi Bengkulu https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kunjungan-kepala-pusat-dokumentasi-dan-jaringan-informasi-hukum-nasional-ke-provinsi-bengkulu

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			SUASANA HARI TERAKHIR STAN KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU DI BENGKULU EXPO https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/suasana-hari-terakhir-stan-kanwil-kemenkumham-bengkulu-di-bengkulu-expo
			PELANTIKAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI BENGKULU https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pelantikan-anggota-majelis-kehormatan-notaris-wilayah-provinsi-bengkulu
			KEGIATAN HARI KEDUA DAN PENUTUPAN RAPAT KERJA TRANSFORMASI DAN SUPERVISI KINERJA KEMENKUMHAM TAHUN 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kegiatan-hari-kedua-dan-penutupan-rapat-kerja-transformasi-dan-supervisi-kinerja-kemenkumham-tahun-2019
			PEMBUKAAN RAPAT KERJA TRANSFORMASI PENGELOLAAN DAN SUPERVISI KINERJA KEMENKUMHAM 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pembukaan-rapat-kerja-transformasi-pengelolaan-dan-supervisi-kinerja-kemenkumham-2019
			TIM VERIFIKATOR PENERIMAAN CPNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU MULAI BEKERJA DENGAN TELITI DAN TUNTAS https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/tim-verifikator-penerimaan-cpns-kantor-wilayah-kementerian-hukum-dan-ham-bengkulu-mulai-bekerja-dengan-teliti-dan-tuntas
			RAPAT LANJUTAN PERSIAPAN RAKER 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-lanjutan-persiapan-raker-2019
		Desember 2019	KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU LAKSANAKAN UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE-91 TAHUN 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanwil-kemenkumham-bengkulu-laksanakan-upacara-peringatan-hari-

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			ibu-ke-91-tahun-2019
			Coaching Kemenkumham CorpU kepada ASN Lapas Kelas IIA Curup https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/coaching-kemenkumham-corpU-kepada-asn-lapas-kelas-ia-curup
			Kakanwil dan Kadiv Pas Lakukan Sidak di Lapas Kelas IIA Curup https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-dan-kadiv-pas-lakukan-sidak-di-lapas-kelas-ia-curup
			Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan Jajaran Mengikuti Teleconference Terkait Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba di Lapas/Rutan https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanwil-kemenkumham-bengkulu-dan-jajaran-mengikuti-teleconference-terkait-pencegahan-dan-penanggulangan-peredaran-gelap-narkoba-di-lapas-rutan
			PROVINSI BENGKULU DAPATKAN PENGHARGAAN PADA PERINGATAN HARI HAK ASASI MANUSIA (HAM) SE-DUNIA KE-71 TAHUN 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/bengkulu-dapatkan-penghargaan-pada-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-ham-se-dunia-ke-71-tahun-2019
			Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Masyarakat https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penguatan-pelaksanaan-tugas-dan-fungsi-masyarakat
			RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TA 2019 https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-persiapan-pelaksanaan-seleksi-cpns-ta-2019
			RAPAT KOORDINASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-koordinasi-kantor-wilayah-kementerian-hukum-dan-ham-bengkulu-2
			KAKANWIL LAKUKAN PENINJAUAN PEMBANGUNAN LPKA KELAS II BENGKULU

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			https://bengkulu.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-lakukan-peninjauan-pembangunan-lpka-kelas-ii-bengkulu
			Divisi Pemasarakatan Ikuti Pengarahan Dirjenpas Lewat Teleconference dalam Rangka Percepatan Crash Program Pemenuhan Hak WBP (CB,PB) https://bengkulu.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/divisi-pemasyarakatan-ikuti-pengarahan-dirjenpas-lewat-teleconference-dalam-rangka-percepatan-crash-program-pemenuhan-hak-wbp-cb-pb

A. Capaian Kinerja

Melalui seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Administrasi selama Tahun 2019 (1 semester) dan sesuai rekapitulasi pelaksanaan kegiatan diatas didapatkan disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja kegiatan dan target kinerja telah terpenuhi sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA
Tersedianya layanan pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.	1 layanan	1 layanan	100%
	2. Layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.	1 layanan	1 layanan	100%
	3. Layanan keuangan yang akurat dan akuntabel.	1 layanan	1 layanan	100%
	4. Layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan.	1 layanan	1 layanan	100%
	5. Layanan ketatausahaan	1 layanan	1 layanan	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA
	yang akurat dan akuntabel.			
	6. Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar.	1 layanan	1 layanan	100%
	7. Layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan.	1 layanan	1 layanan	100%

B. Realisasi Anggaran

Sesuai laporan dalam aplikasi E Smart DJA, realisasi anggaran Divisi Administrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Nama Program	Nama Kegiatan	PAGU (RP)	Realisasi (RP)	%
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja (Layanan)	740.090.000	726.391.682	98%
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Perkantoran (Layanan)	12.267.712.000	12.220.705.163	99%
TOTAL		13.007.802.000	12.947.096.845	99.07%

Berdasarkan data SPAN (Monev Anggaran) realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 12.947.096.845,- atau 99.07% dari total Pagu Rp. 13.007.802.000,-. Perlu disampaikan bahwa DIPA Sekretarian Jenderal TA. 2019 telah mengalami 7 (Tujuh) Kali revisi DIPA yang mengakibatkan jumlah total PAGU DIPA tahun anggaran 2019 bertambah Rp. 2.510.879.000,- yang sebelumnya berjumlah Rp. 10.496.923.000 menjadi 13.947.096.845,-.

Penyerapan anggaran yang cukup optimal ini disebabkan karena selain bertambahnya kegiatan pelayanan disamping itu juga digunakan untuk belanja pegawai dan belanja pemeliharaan.

C. Analisa

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Divisi Administrasi diatas menunjukkan bahwa hampir 100 % kegiatan telah dilaksanakan. Jika dilihat dari pelaksanaan kegiatan dengan data kalender kerja kegiatan, sebenarnya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meskipun demikian Divisi Administrasi tetap berusaha untuk menyelesaikan 100 % dari target capaian kerjanya.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan yang memiliki fokus utama sasaran kegiatan yaitu meningkatkan penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah, telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam indikator kinerja. Kegiatan yang dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan diantaranya yaitu pembinaan dan pemenuhan hak atas Warga Binaan Pemasyarakatan, menindaklanjuti pemeriksaan pengaduan terkait pelayanan pemasyarakatan baik dari internal pemasyarakatan maupun eksternal pemasyarakatan, serta rangkaian kegiatan dalam rangka menghadapi isu-isu aktual terkait pemasyarakatan yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Berikut adalah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu selama tahun 2019:

2.1. Pemberian Remisi

Remisi	RU	RK	JUMLAH
Imlek	-	-	-
Nyepi	-	1	1
Waisak	-	-	-

Idul Fitri	-	1471	1471
Remisi Umum 17	1475	-	1475
TOTAL	1475	1472	2947

2.2. Pelatihan dan Pembinaan WBP

NO	UPT	INDUSTRI	WBP YANG SUDAH PELATIHAN	PEKERJA NAPI	MITRA KERJA
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	Pembuatan Pakan Ikan	2 Org	13 orang	Pemesanan Perorangan Pribadi Dinas Perikanan Propinsi Bkl
		Pertukangan Kayu	2 Org		
		Menerima Pesanan Jasa macam-macam Teralis	2 Org		
		Perikanan dan Peternakan	2 Org		
		Pangkas Rambut	2 Org		
		Laundry	3 Org		
2	Lapas Kelas IIA Curup	Penggilingan Kopi	3 Org	10 Orang	PKB BLK UKM
		Ternak Ikan	2 Org		
		Otomotif	2 Org		
		Kerajinan Tangan, Pembuatan tas, Merangakai Bunga Hiasan	3 Org		
3	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	Kerajinan Pembuatan tas	3 Org	5 Orang	
		Pembuatan Kaset	2 Org		
4	LPKA Kelas II Bengkulu	Pembuatan Lukisan	5 Org	7 Orang	PKBI
		Kerajinan lampu hias	2 Org		UKM
5	Lapas Kelas IIB Argamakmur	Peternakan dan Perikanan	3 Org	9 Orang	
		Kerajinan Gantung Kunci	2 Org		
		Kerajinan Bunga Bonsai	2 Org		
		Pembuatan	2 Org		

		Kapal,Meriam,Dll			
6	Rutan Kelas IIB Bengkulu	Kerajinan Boneka	3 Org	3 Orang	
7	Rutan Kelas IIB Manna	Kerajinan Boneka Patung Dari kayu	4 Org	8 Orang	

2.3. Pembinaan Kepada Narapidana Kasus Terorisme

NO.	UPT	ISI	KEADAAN			KET.
			KEAMANAN	PEMBINAAN	KESEHATAN	
1	LP Bengkulu	2	Kondusif	Pembinaan Sama Dengan Narapidana Lain	Baik	Kondisi Aman Dan Kondusif
2	LP Curup	2	Kondusif	Pembinaan Sama Dengan Narapidana Lain	Baik	Kondisi Aman Dan Kondusif
3	LP Arma	1	Kondusif	Pembinaan Sama Dengan Narapidana Lain	Baik	Kondisi Aman Dan Kondusif

Terkait kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana teroris adalah sebagai berikut:

1) Program Pembinaan Keagamaan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan keyakinan yang dianut oleh WBP, disamping dilaksanakan oleh petugas lapas sendiri, juga dibantu pihak dari kanwil kementerian Agama. kegiatan antara lain : Pemberian Ceramah Agama, Pengajian, Pendidikan Agama yang menyesuaikan dengan agama masing-masing.

2) Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan diselenggarakan dengan metode dialog, pemutaran film, diskusi buku, analisa kasus dan upacara selama berada di dalam Lapas.

3) Kegiatan Sosial

Kegiatan Sosial yaitu kegiatan dilaksanakan bersama anggota masyarakat diluar lapas antara lain : Kunjungan Keluarga yang pelaksanaannya yang diatur sesuai dengan jadwal, gotong royong bersama masyarakat membersihkan lingkungan lapas, bantuan donor darah yang membutuhkan masyarakat.

4) Program Pembinaan Psikologi

Kegiatan pembinaan psikologi mengundang nara sumber dan diselenggarakan melalui metode penguatan karakter, manajemen konflik, konseling dan penguatan hubungan sosial selama berada di Lapas.

5) Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan yang dilakukan adalah membaur dengan warga binaan pemasyarakatan lain dengan melibatkan dalam kegiatan olah raga pada hari bhakti Pemasyarakatan dan hari ulang tahun 17 agustus dibuktikan di lapas bersama, kesenian dan pendidikan.

- Laporan Koordinasi dan Kerjasama dalam Pembinaan WBP
 - a. Pembinaan Kemandirian WBP dalam hal kegiatan Kerja dimana salah satunya memfasilitasi kegiatan Pameran Produk Unggulan Narapidana di tingkat Propinsi dan Kabupaten.
 - b. Pengawasan dan pembinaan terhadap WBP oleh dinas Sosial; Peran Peksos dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum bekerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

- c. Dalam bidang pembinaan mental spiritual telah dilakukan dibidang keagamaan lainnya dalam bentuk kebaktian dan ibadah bersama didalam Lapas/Rutan.
- d. Bentuk partisipasi WBP dalam bidang kebersihan terhadap lingkungan sekitar dilakukan secara rutin setiap hari, sedangkan dalam bidang peribadatan pihak Lapas/Rutan mengundang tokoh agama setempat, untuk memberikan bimbingan rohani terhadap WBP di dalam Lapas/Rutan.

2.4. Koordinasi dengan Dilkumjakpol

Rapat Koordinasi Dilkumjakpol Plus diselenggarakan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tanggal 17 Juni 2019. Rapat ini mengundang tidak hanya Kepala UPT Pemasyarakatan Lapas dan Rutan, melainkan juga dari instansi penegak hukum lainnya. Instansi yang diundang adalah Kepolisian Daerah Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan BNN Bengkulu. Isu yang diangkat dalam rapat koordinasi ini adalah permasalahan overstaying. Penanganan yang tepat terkait permasalahan ini adalah koordinasi yang berkesinambungan antar instansi penegak hukum, sehingga permasalahan yang muncul dikarenakan overstaying dapat diminimalkan.

3.2.5. Pelaksanaan Sidak/Razia pada Lapas/Rutan

No	UPT	Pelaksanaan	Pelaksana	Ket
1.	Lapas Bengkulu	19 kali	Kanwil dan Lapas Bengkulu	
2.	Lapas Curup	23 kali	Kanwil dan Lapas Bengkulu	
3.	Lapas Arma	18 kali	Kanwil dan Lapas Arma	
4.	Rutan Bengkulu	15 kali	Kanwil dan Rutan bengkulu	
5.	Rutan Manna	30 kali	Kanwil dan Rutan Manna	
6.	LPKA Bengkulu	24 kali	Kanwil dan LPKA Bengkulu	
7.	LPP Bengkulu	22 kali	Kanwil dan LPP Bengkulu	

Dalam setiap kegiatan Sidak masih di temukan Hanphone dan benda terlarang lainnya, setelah dibuatkan Berita Acara, barang hasil Razia semua dimusnahkan. Kegiatan Razia/Penggeledahan tetap dilaksanakan secara rutin dan berkelayang dilaksanakan oleh Tim Satgas kamtib UPT setempat. Pimpinan dan seluruh jajaran terus-menerus Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Untuk jaminan kesehatan WBP didalam Lapas/Rutan.

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan selama periode tahun 2019, maka diperoleh data capaian kinerja Divisi Pemasarakatan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PRESENTASE CAPAIAN KINJERA
Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di wilayah	1. UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	10 UPT	10 UPT	100%
	2. Pemahaman masyarakat terkait Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak	1 wilayah	100%	100%

B. Realisasi Anggaran

Sesuai laporan dalam aplikasi E Smart DJA, realisasi anggaran Divisi Pemasyarakatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Nama Program	Nama Kegiatan	PAGU (RP)	Realisasi (RP)	%
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Pembinaan UPT Pemasyarakatan (UPT)	523.396.000	521.822.094	99.70%
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Wilayah)	59.080.000	54.717.000	92.62%
TOTAL		582.476.000	576.539.094	99%

Berdasarkan data SPAN (Monev Anggaran) realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 576.539.094,- atau 99% dari total Pagu Rp. 582.476.000,-.

C. Analisa

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan data capaian kinerja Divisi Pemasyarakatan dalam kurun waktu 2019 menunjukkan bahwa terdapat 10 UPT Pemasyarakatan di wilayah telah disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar, hal ini dibuktikan dengan pelayanan pemberian remisi kepada WBP pada seluruh Lapas/Rutan di Bengkulu dan di hadirinya Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bengkulu, serta telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi di 10 UPT Pemasyarakatan.

Selain itu indikator pemahaman masyarakat terkait Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah terpenuhi. Kegiatan

pengumpulan data guna Pemenuhan Hak Identitas Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu Hingga Desember 2019 berjumlah 51 anak didik yang terdiri dari 29 anak usia dibawah 17 tahun terdiri dari 18 domisili dari Kota Bengkulu dan 1 diluar domisili Kota Bengkulu serta 22 anak usia di atas 17 tahun yang terdiri dari 5 domisili Kota Bengkulu dan 7 anak berdomisili di luar Kota Bengkulu. Berdasarkan Data di atas Perekaman data anak di LPKA Klas II Bengkulu berjumlah 66,6 % hingga Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- 12 (Dua Belas) anak telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
- 3 (Tiga) masih dalam proses Perbaikan Akte dan Kartu Keluarga
- 3 (Tiga) masih dalam proses Pengumpulan Data (KIA)
- 14 (Empat Belas) masih dalam proses pengusulan perekaman data E-KTP
- 18 (Delapan Belas) Anak di luar Propinsi Bengkulu.

3.3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian yang melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah memiliki peran dalam bidang Pembinaan dan Pengendalian Teknis Operasional Imigrasi bidang Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi tugas dan fungsi keimigrasian di daerah, Divisi Keimigrasian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) selama periode tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran	Kantor Wilayah Tanggal 17 Januari 2019	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Kakanwil memberikan banyak masukan, untuk rencana kinerja divisi imigrasi salah satu masukannya adalah lebih baiknya jika kegiatan bisa digabungkan sehingga mempercepat kegiatan dan target kinerja bisa tercapai dengan baik. https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-internal-di-ruang-kerja-kakanwil
3	Pembinaan, Pengendalian, kerjasama, Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu Tanggal 31 Januari 2019	Pemantauan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bengkulu oleh Dirjen HAM Dalam kesempatan tersebut, Dirjen HAM menyempatkan untuk berbincang dengan pengunjung untuk mengetahui kesan terhadap

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
	Intelijen dan Penindakan Keimigrasian		<p>pelayanan Kanim Kelas I TPI Bengkulu. Kanim Kelas I TPI Bengkulu telah memperlihatkan standar pelayanan berbasis HAM yang dilaksanakan disana</p> <p>https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/dirjen-ham-bersama-kakanwil-pantau-layanan-berbasis-ham-di-kantor-imigrasi-kelas-i-tpi-bengkulu</p>
		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu Tanggal 24 Maret 2019	Pembinaan dan Pengendalian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
4	Pembinaan, Pengendalian, kerjasama, Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bengkulu Tanggal 31 Januari 2019	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
		Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bengkulu Tanggal 11 Maret 2019	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

3.1. Pelaksanaan Sosialisasi Keimigrasian

No.	Wil. Kerja	Pelaksanaan	Tempat	Keterangan
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	18 Feb 2019	Stasiun RRI Bengkulu	Penyebarluasan Informasi Keimigrasian melalui kegiatan Dialog Interaktif (Live Radio) dengan tema "Pengawasan Orang Asing Di Wilayah Bengkulu"
2.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	18 Feb 2019	Stasiun TVRI Bengkulu	Penyebarluasan Informasi Keimigrasian melalui Dialog Interaktif (Live) dengan tema "Pengawasan Orang Asing Di Wilayah Bengkulu"
3.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	25 Mar 2019	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima dan Kode Etik
4.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	13 Mei 2019	Stasiun RRI Bengkulu	Dialog Publik (Live) Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Inovasi dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
5.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	13 Mei 2019	Stasiun TVRI Bengkulu	Dialog Publik (Live) Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Inovasi dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
6.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	28 Mei 2019	Ballroom Santika Hotel Bengkulu	Sosialisasi Pencegahan TKI Non Prosedural
7.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	26 Juli 2019	SMA Plus Negeri 7	Sosialisasi Sekolah Kedinasan Poltekim
8.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	12 Sept 2019	The Madeline Hotel	Sosialisasi Pembinaan Terhadap Perusahaan/Yayasan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)
9.	Kantor	12 Sept 2019	Stasiun	Dialog Publik Interaktif (Live)

	Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu		TVRI Bengkulu	dengan tema "Tugas dan Fungsi Keimigrasian"
10.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	26 Sept 2019	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	Rapat Persiapan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal melalui Aplikasi Kedatangan dan Keberangkatan (Sikapal)
11.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	17 Okt 2019	Stasiun RBTB Bengkulu	Dialog Publik Interaktif dengan tema "Peran dan Fungsi Keimigrasian"

3.2. Laporan Penerbitan Paspor

No.	Kantor Imigrasi	48 Hal	24 Hal	TKI	Jumlah
1	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	9188	1031	192	10411

KET : data Penerbitan Paspor s.d Desember 2019

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan selama periode tahun 2019, maka diperoleh data capaian kinerja Divisi Keimigrasian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PRESENTASI CAPAIAN KINERJA
Pembinaan dan Pengawasan UPT Imigrasi	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengawasan UPT Keimigrasian	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100 %

B. Realisasi Anggaran

Sesuai laporan dalam aplikasi E Smart DJA, realisasi anggaran Divisi Keimigrasian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Nama Program	Nama Kegiatan	PAGU (RP)	Realisasi (RP)	%
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	515.866.000	511.290.266	99.11%
Jumlah		515.866.000	511.290.266	99.11%

C. Analisa

Dari data rekapitulasi pelaksanaan anggaran dalam kurun waktu tahun 2019 dapat dilihat bahwa 4 komponen kegiatan telah dilaksanakan, sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja pada Divisi Keimigrasian mencapai 100%. Sedangkan data realisasi anggaran menunjukkan besaran realisasi sebesar Rp. 511.290.266,- .

3.4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai 6 program kerja yang masing-masing terdapat sasaran kegiatan yang harus terlaksana dengan berpatokan pada indikator kinerja kegiatan. Berikut adalah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selama tahun 2019 pada setiap program kinerja:

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	KOORDINASI KE BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA	Bengkulu Utara 13 Januari 2019	Tim dipimpin oleh Garnadi (Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu) didampingi oleh Nelly Sinarti (Kepala Bidang HAM), kedatangan tim ini diterima

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			<p>langsung oleh Zulkarnaen (Kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara) yang menyambut baik dan siap memfasilitasi rencana pelaksanaan kegiatan Diseminasi HAM tersebut.</p> <p>Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan Diseminasi HAM ini dapat memberikan informasi kepada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan pemenuhan HAM kepada masyarakat</p>
2	Rapat Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Bapas Bengkulu 27 Februari 2019	<p>Pemerintah kabupaten /kota melaksanakan aksi Ham Tahun 2019 yang mencakup tentang Harmonisasi Rancangan produk Hukum daerah untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan hak masyarakat adat. Untuk mendukung capaian Aksi HAM pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tersebut Bupati/Walikota membentuk Tim RANHAM di daerah. Setelah itu laporan capaian Aksi HAM disampaikan melalui sistem pemantauan kantor Staf Presiden pada https://serambi.ksp.go.id.</p>
3	Rapat Persiapan Dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Dan Parlegal	Kantor Wilayah 25 Januari 2019	<p>Rapat Persiapan Dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Dan Parlegal. Senin, (25/02/2019).</p> <p>Rapat dibuka langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham (Siti Cholistaningsi) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Garnadi) dan Kabagkum (Roseffendi). Rapat ini hadir dari Cp Wcc, Yayasan Aisyiyah, LKBH, Biro Hukum, Yayasan Pupa, dan LBH Bhakti Alumni serta</p>

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			Eselon IV, JFT, dan JFU Kanwil Kemenkumham Bengkulu.
4	Pengumpulan Data Lapangan, Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM Berdialog dengan Ka. Kanwil Kemenkumham Bengkulu	Kantor Wilayah 21 Februari 2019	<p>Tim Penelitian Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham RI disambut langsung Ka. Kanwil Kemenkumham Bengkulu (Ilham Djaya) didampingi oleh Kasubid Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM (Basori). Adapun Tim Penelitian terdiri dari 3 Orang yakni Ulang Mangun (Ketua Tim), Oktaviana dan Jofefine Mareta (Anggota).</p> <p>Dalam kesempatan tersebut tim melakukan Pengambilan Data Lapangan dengan Ka. Kanwil untuk mengetahui sejauh mana tanggapan Ka. Kanwil terhadap penempatan Auditor pada tiap – tiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Disamping itu juga untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penempatan dan pemahaman terhadap tugas – tugas Auditor di Kantor Wilayah</p>
5	Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Bengkulu - Kanwil Kemenkumham Bengkulu	Kantor Wilayah 13 Februari 2019	Rabu (13/02/2019), Bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dilaksanakan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Bengkulu yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (Ilham Djaya) selaku Ketua MKN Wilayah Bengkulu didampingi oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM (Siti Cholistyaningsih) dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Bengkulu
6	Penyuluhan Hukum tentang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI)	SMA 7 Kabupaten Seluma 11 Februari 2019	"Dalam arahan tim penyuluhan Hukum, menyampaikan bahwa layanan AHU yg ada sekarang sudah menggunakan sistem Isyanan AHU Online seperti halnya masalah

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
	kepada siswa SMP Negeri 7 Kabupaten Seluma		Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kewarganegaraan, Yayasan dan Perkumpulan, PT dan CV. Hal ini perlu disosialisasikan kepada para siswa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Bengkulu serta untuk mewujudkan dan mengimplementasikan progeam pemerintah
7	Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 - Kanwil Kemenkumham Bengkulu	Bengkulu 20 Februari 2019	<p>Untuk Wujudkan Peraturan Daerah yang Berkualitas maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 bertempat di Hotel Splash, Rabu (20/02/2019). Kegiatan Ini diikuti 30 Orang Peserta terdiri dari JFT Perancang Undang-undang Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Sekwan Pempro dan Pemkot Bengkulu, Biro Hukum Sekda Pemprov Bengkulu dan Bagian Hukum Sekda Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu.</p> <p>Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Siti Cholistyaningsih) dan Kepala Divisi Pemasarakatan (Erwedi Suprayitno). Adapun yang bertindak sebagai Narasumber Ka. Kanwil Kemenkumham Bengkulu (Ilham Djaya), Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Nuryanti Widyastuti) dan Kasubag Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Bengkulu (Ahmad Medapri) serta bertindak sebagai Moderator Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM</p>

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			(Siti Cholistyarningsih).
8	Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2019	Bengkulu 28 Maret 2019	Dalam Paparannya Kakanwil menyampaikan Untuk menyebarluaskan informasi serta meningkatkan pemahaman terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama Aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam rangka terlaksananya bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok masyarakat miskin secara efektif dan efisien untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.
9	Sosialisasi KI bagi siswa siswi SMA N 4 Kota Bengkulu	Bengkulu 22 Maret 2019	Memberikan informasi kepada 900 orang siswa siswi dan para guru serta seluruh pegawai SMAN 4 Kota Bengkulu, Kanwil Kemenkumham Bengkulu membentuk pojok KI di SMAN 4 Kota Bengkulu. Pojok KI ini memberikan informasi tentang manfaat KI, jenis jenis KI, tata cara pendaftaran KI, perlindungan KI, dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan KI. Pada pojok KI ini di pasang diagram dan syarat2 pendaftaran merek, hak cipta, paten, dan desain industri. Selain itu pojok KI juga menyediakan brosur KI untuk dibagikan secara gratis.
10	KADIVYANKUM AKAN ANGKAT POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS BENGKULU KE TINGKAT NASIONAL	Bengkulu 18 Maret 2019	Dalam arahanya KADIVYANKUM _menjelaskan pentingnya pendafataran indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan hukum ,Kantor Wlayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu siap mendampingi dan memfasilitasi pendaftaran Indikasi

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			<p>Geografis Provinsi Bengkulu</p> <p>Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Bengkulu tahun ini memiliki target untuk mendaftarkan potensi Indikasi Geografis Batik Besurek, tenun bumpak dan Jeruk Kalamansi. Dalam waktu dekat dinas PERINDAG Bengkulu akan mengumpulkan para pengerajin batik untuk membahas proses pendaftaran indikasi geografis. disamping indikasi geografis pada tahun 2019 ini provinsi Bengkulu akan mendaftarkan 30 merek industry kecil menengah dan 1 merek Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu Bencolen Coffe.</p>
11	<p>Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Bengkulu</p>	<p>Bengkulu 03 Mei 2019</p>	<p>"Pengenalan tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual sangat penting untuk diketahui, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami betul tentang kekayaan intelektual. Melalui pertemuan Sosialisasi pada hari ini kami mengharapkan bantuan dan kerjasama bapak/ibu kiranya dapat membantu dalam menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan KI kepada Masyarakat Umum lainnya termasuk juga kepada pelaku usaha sehingga dapat memahami akan pentingnya penghargaan dan perlindungan terhadap KI."</p>
12	<p>KAKANWIL MELAKUKAN PEMANTAUAN LAYANAN AHU DI SELUMA</p>	<p>Seluma 02 Oktober 2019</p>	<p>Dalam kesempatan ini, Kakanwil menyampaikan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait Pemantauan Evaluasi Layanan Administrasi Umum</p>

NO	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
13	KOORDINASI KE BIRO HUKUM SEKDA PROVINSI BENGKULU TERKAIT MEMAKSIMALKAN PELAPORAN AKSI HAM DAERAH	Bengkulu 18 Desember 2019	Kepala SUB Bidang pemajuan HAM Kemenkumham Bengkulu (Oliver Sitanggang) melakukan koordinasi ke Biro Hukum Sekda Provinsi Bengkulu di sambut langsung Kasubbag Pemajuan HAM (Wiske Zola) adapun tujuan koordinasi memaksimalkan pelaporan Aksi HAM Daerah (AHAMDA) B12 tahun 2018, dimana Aplikasi : http://serambi.ksp.go.id kantor Staf Presiden mulai bisa di akses untuk di input/upload data dukung pada tanggal 28 Desember 2018 S/D tanggal 11 januari 2019. Sesuai dengan Perpres Nomor : 33 Tahun 2018 Perubahan dari Perpres Nomor 75 Tahun 2015 Tentang : RANHAM

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan selama tahun 2019, maka diperoleh data capaian kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai berikut:

Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah yang efektif.	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	13 dokumen	13 dokumen	100 %
	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
	Dukungan layanan AHU di wilayah	1 dokumen	1 dokumen	100%

Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah.	penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	18 jumlah permohonan	18 Permohonan	100%
	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil	1 jumlah kasus	1 Kasus	100%

REKAPITULASI PENYELESAIAN PERMOHONAN KI TAHUN 2019

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON
1.	Merk	65 Permohonan
2.	Hak Cipta	198 Permohonan
3.	Desain Industri	1 Permohonan
4.	Hak Paten	1 Permohonan
5.	Indikasi Geografis	1 Permohonan
TOTAL PEMOHON		268 Permohonan

Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) NA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di Daerah	Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	40 Raperda	43 Raperda	107,5%
Treselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	30 Orang	30 Orang	100%

Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Jumlah Layanan HAM di Wilayah	Jumlah Layanan HAM di Wilayah	25000 Layanan	25000 Layanan	100%
Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM	2 Pemda	2 Pemda	100 %

Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	148 orang	275 orang	175%
	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin	16 kegiatan	96 kegiatan	600%
	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 kantor wilayah	1 kantor wilayah	1 kantor wilayah
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 kantor wilayah	1 kantor wilayah	1 kantor wilayah
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 kantor wilayah	1 kantor wilayah	1 kantor wilayah
	Terselenggaranya pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50 peserta kegiatan	50 peserta kegiatan	100%

PENGAYOMAN

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0%
Sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100%

B. Realisasi Anggaran

Sesuai laporan dalam aplikasi E Smart DJA, realisasi anggaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di bagi kedalam 6 DIPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Program Administrasi Hukum Umum

Nama Program	Nama Kegiatan	PAGU (RP)	Realiasasi (RP)	%
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Pembinaan UPT Pemasarakatan (UPT)	523.396.000	521.822.094	99.70%
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Wilayah)	59.080.000	54.717.000	92.62%
TOTAL		582.476.000	576.539.094	99%

Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Nama Program	Nama Kegiatan	PAGU (RP)	Realisasi (RP)	%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Layanan HKI di Daerah (Jumlah Permohonan)	104.685.000	104.404.000	99.73%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Penegakan Hukum di Daerah (Jumlah Kasus)	48.372.000	48.122.000	99.48%
TOTAL		153.057.000	152.526.000	99.6 %

Program Pembentukan Hukum

Nama Program	Nama Kegiatan	PAGU (RP)	Realisasi (RP)	%
Program Pembentukan Hukum	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah (Raperda)	99.125.000	99.057.200	99.73%
Program Pembentukan Hukum	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah (Orang)	42.605.000	40.339.000	95%
TOTAL		141.730.000	139.396.200	98%

Program Pemajuan HAM

Nama Program	Nama Kegiatan	PAGU (RP)	Realisasi (RP)	%
Program Pemajuan HAM	Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah (Layanan)	146.858.000	146.635.200	99.84%
Program Pemajuan HAM	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah (Pemda)	92.126.000	92.096.000	99.96%
TOTAL		141.730.000	139.396.200	99.88%

Program Pembinaan Hukum Nasional

Nama Program	Nama Kegiatan	PAGU (RP)	Realisasi (RP)	%
Program Pembinaan Hukum Nasional	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (Orang)	1.131.000.000	1.131.000.000	100 %
Program Pembinaan Hukum Nasional	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (Kegiatan)	525.440.000	505.960.000	96 %
Program Pembinaan Hukum Nasional	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum (Kantor Wilayah)	83.715.000	80.942.150	97 %
Program Pembinaan Hukum Nasional	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah (Kantor Wilayah)	150.000.000	144.734.000	96%

Program Pembinaan Hukum Nasional	Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah (Kantor Wilayah)	87.614.000	87.614.000	100%
Program Pembinaan Hukum Nasional	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN (Kantor Wilayah)	87.614.000	82.841.550	95%
Program Pembinaan Hukum Nasional	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas OBH Paralegal (Tematik) (Peserta Kegiatan)	25.600.000	25.528.000	99%
TOTAL		2.090.983.000	2.058.619.700	98%

PENGAYOMAN

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

Nama Program	Nama Kegiatan	PAGU (RP)	Realisasi (RP)	%
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Penelitian dan Pengembangan (Layanan)	38.980.000	38.370.000	98%
TOTAL		38.980.000	38.370.000	99.88%

C. Analisa

Program Administrasi Hukum Umum

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Administrasi Hukum Umum diatas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja mencapai 99% bahkan terdapat indikator *output* (kegiatan) yang memiliki nilai capaian yang tinggi yaitu sebesar 99.70%. Artinya kegiatan pada Program Administrasi Hukum Umum selama periode tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual memiliki dua indikator kinerja yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2019 telah menerima 295 Permohonan kekayaan intelektual terkait merk, hak paten dan hak cipta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual telah melaksanakan kegiatan dengan baik karena memenuhi indikator kinerja mencapai 18 jumlah pemohon kekayaan intelektual yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya realisasi penyerapan anggaran sebesar 99.73%.

Program Pembentukan Hukum

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Pembentukan Hukum menunjukkan bahwa seluruh indikator kegiatan telah dilaksanakan 100% pada tahun 2019, bahkan ada yang mencapai 107.5% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Program Pembentukan Hukum sangat baik dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi sasaran kegiatan satu tahun anggaran, terbukti dari capaian kinerja yang telah melampaui seluruh target kinerja satu tahun. Walaupun sebenarnya dalam melaksanakan kegiatan terdapat kendala yaitu terkadang Pemerintah Daerah kurang melibatkan Perancang dalam penyusunan Raperda dan penerbitan Surat Perintah yang memakan waktu agak lama pada akhirnya mengganggu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang sudah direncanakan. Meskipun demikian realisasi anggaran tahun 2019 pada Program Pembentukan Hukum telah melampaui dari target rencana realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Program Pemajuan HAM

Berdasarkan Program Pemajuan HAM rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Pemajuan HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan guna memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang pertama yaitu memberikan layanan HAM di wilayah telah terlaksana sebesar 100% dan indikator kedua terkait jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM sebanyak 2 Kota/Kabupaten. Apabila dilihat dari segi keuangan, realisasi anggarantahun 2019 pada Program Pemajuan HAM telah melampaui dari target rencana realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Program Pembinaan Hukum Nasional

Pelaksanaan kegiatan dan data capaian kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional dalam kurun waktu tahun 2019 menunjukkan adanya perubahan, sesuai dengan perjanjian kinerja target kinerja untuk Kegiatan Bantuan Litigasi semula target yang ditetapkan sebanyak 148 kasus dan untuk kegiatan bantuan non litigasi sebanyak 16 Kasus berubah menjadi 275 untuk Kegiatan Bantuan Litigasi dan 96 untuk Kegiatan Bantuan non Litigasi hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah anggaran di bulan November 2019 disamping itu masyarakat miskin yang telah memperoleh bantuan hukum litigasi adalah 275 orang/ kasus telah terlaksana dan 96 orang/kasus kegiatan non litigasi kepada masyarakat miskin yang telah terlaksana serta telah terselenggara pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik). Ketiga indikator kinerja tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai target kinerja, namun untuk diketahui kendala yang sering dihadapi yaitu proses pencairan anggaran dan proses verifikasi berkas permohonan bantuan hukum kurang sinergi, dikarenakan dalam proses pencairan anggaran melibatkan koordinasi dengan Pimti selaku penandatangani berkas permohonan ke KPPN, yang tidak senantiasa berada di tempat tugas (Kantor Wilayah) dikarenakan tugas/agenda kegiatan diluar Kantor Wilayah.

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM memiliki dua indikator kinerja yaitu mensosialisasikan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM dan rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia. Dari kegiatan tersebut menghasilkan 1 buku sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator terkait rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan

pengembangan hukum dan HAM juga sudah terpenuhi, selama kurun waktu periode 1 tahun telah dilaksanakan beberapa kegiatan pengambilan data kepada narapidana kasus Narkotika dalam rangka memenuhi indikator tersebut. Adapun perbandingan data realisasi anggaran yang diperoleh dari aplikasi e – smart DJA pada tahun 2019 terdapat penyerapan anggaran sebesar 99.88% artinya didalam program penelitian dan pengembangan realisasi anggaran yang telah ditetapkan sudah mencapai optimalisasi dan mencapai hasil yang telah di rencanakan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019. LKIP tahun 2019 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama tahun 2019 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).

Secara umum kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan jadwal dan anggaran yang direncanakan; Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sampai akhir tahun 2019, serapan anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu disekitar angka 99,92% dan telah mencerminkan pencapaian hasil kerja baik out put dan out come yang sesuai dengan biaya atau input yang dikeluarkan.

Selain itu secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Bengkulu, adalah sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan tuisi terlambat bahkan belum terlaksana, terkendala oleh kurangnya pemahaman SDM dan pedoman pelaksanaan tuisi yang belum terbit.
2. Kurangnya koordinasi yang baik antar pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu serta pihak eksternal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal.

3. Keterbatasan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan.
4. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja yang telah ditetapkan.
5. Terdapat kendala pada realisasi anggaran dikarenakan keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan.

Pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kinerja akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Merujuk pada kendala dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu :

1. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, perlu kiranya memperkuat koordinasi dengan Unit Eselon I, sehingga dapat lebih efektif dan terarah dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan, terutama terkait pada pedoman pelaksanaan tugas.
2. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu serta melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan *stakeholder* lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal kalender kerja yang telah disepakati, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.
5. Para pelaksana kegiatan diharapkan segera memenuhi dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat segera dibuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dilaporkan pada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setempat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik dalam bentuk teknis maupun administratif. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Kantor Wilayah,

Abdul Hany
NIP. 196005161985031002

LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002**

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	40 Raperda
2.	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	30 Orang

Kegiatan :


Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

Anggaran :

Rp. 141.730.000,-

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

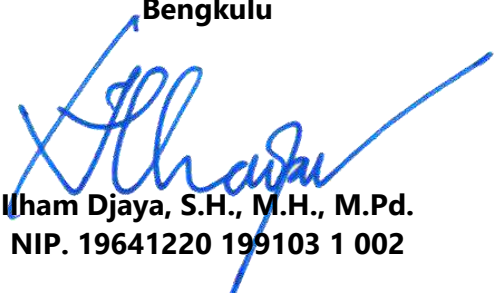
Nama : Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002**

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	13 Dokumen
2.	Layanan MKNW, MPW, dan MPD Notaris	Terselenggaranya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris	12 Bulan Layanan
3.	Dukungan Layanan AHU di Wilayah	Terlaksananya dukungan pelaksanaan program Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1 Dokumen

Kegiatan :

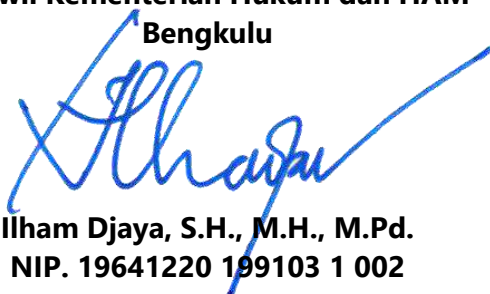
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Anggaran :

Rp. 1.900.000.000,-

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah
 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
 Bengkulu**


Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002

**Pihak Pertama,
 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
 Bengkulu**


Siti Cholistyaniingsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

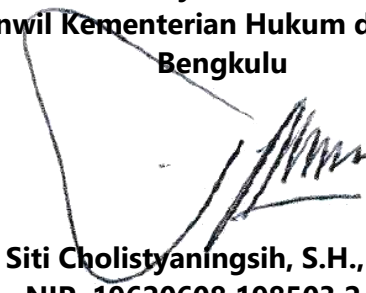
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002**

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Layanan HKI di Daerah	1. Persentase penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Jumlah Permohonan HKI yang diajukan melalui Kanwil 3. Jumlah KI Komunal yang diinventarisasi	18 Jumlah Permohonan
2	Penegakan Hukum di Daerah	1. Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil 2. Jumlah Indikasi Geografis yang diawasi	1 Jumlah Kasus

Kegiatan :

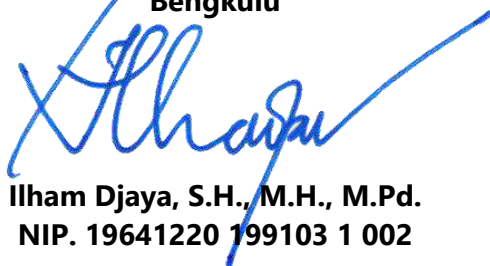
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Anggaran :

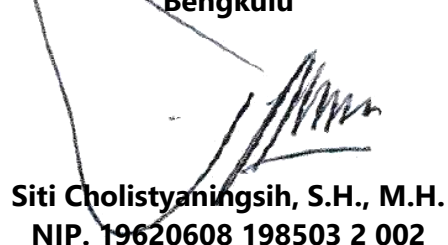
Rp. 153.057.000,-

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Siti Cholistyaniingsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

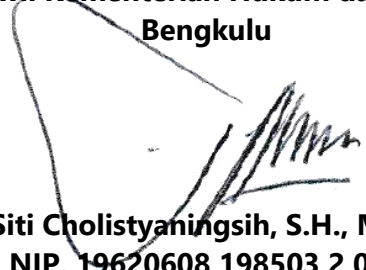
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002**

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1. Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia 2. Hasil penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Layanan

Kegiatan :

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Anggaran :

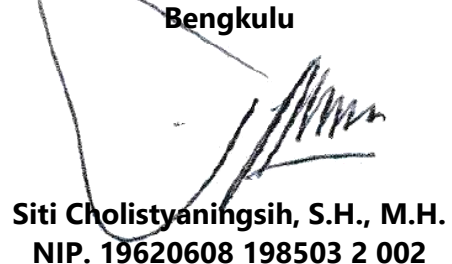
Rp. 38.980.000,-

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Siti Cholistyaniingsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selanjutnya disebut pihak pertama

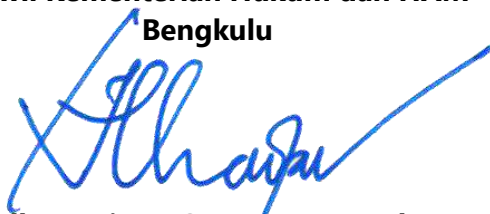
Nama : Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002**

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	148 Orang/Kasus
2	Kegiatan Bantuan Hukum dan non Ligitasi	Jumlah Kegiatan Bantuan non Ligitasi kepada orang atau kelompok Masyarakat miskin	16 Kegiatan
3	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
4	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan sadar Hukum di Daerah	Jumlah Penyuluh hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah
5	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
6	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui Sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah
7	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	Terselenggaranya pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	1 Kantor Wilayah

Kegiatan :


Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Anggaran :

Rp. 1.789.263.000,-

Bengkulu, Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu


Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu


Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 0021



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002**

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Siti Cholistyarningsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 0021**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	25.000 Layanan
2.	Pengembangan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan aksi HAM 2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2 Pemda

Kegiatan :

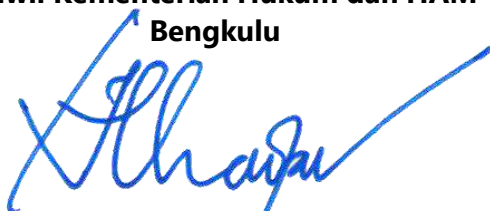
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah

Anggaran :


Rp. 238.984.000,-

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Siti Cholistyaniingsih, S.H., M.H.
NIP. 19620608 198503 2 0021



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Esti Winahyu Nur Handayani, S.pd.,M.pd.
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Imigrasi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Esti Winahyu Nur Handayani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19600912 198103 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	24 Kegiatan

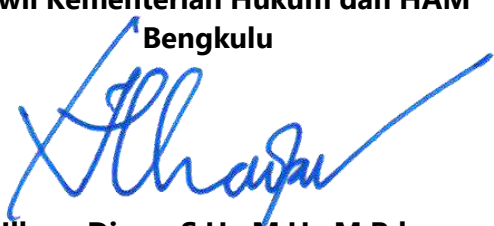
Kegiatan :

Anggaran :

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum dan Keimigrasian di Wilayah Rp. 515.866.000,-

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Imigrasi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


Esti Winahyu Nur Handayani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19600912 198103 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Asep Somara, Bc.I.P., S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002**

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Ida Asep Somara, Bc.I.P., S.Sos., M.M.
NIP. 19710102 199403 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan 2. Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu 3. Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel 4. Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan 5. Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel 6. Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat.	1 Layanan
2	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan

Kegiatan :

Anggaran :

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Rp. 10.496.923.000,-

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah
 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
 Bengkulu**

**Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
 NIP. 19641220 199103 1 002**

**Pihak Pertama,
 Kepala Divisi Administrasi
 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
 Bengkulu**

**Ida Asep Somara
 NIP. 19620608 198503 2 0021**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwedi Supriyatno, Bc.I.P., S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

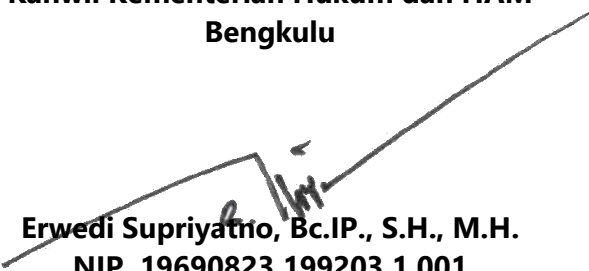
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002**

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Erwedi Supriyatno, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 19690823 199203 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	10 UPT

Kegiatan :

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Anggaran :

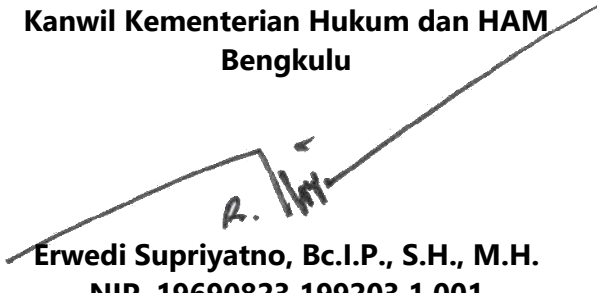
Rp. 582.476.000,-

Bengkulu, Januari 2019

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19641220 199103 1 002**

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu**


**Erwedi Supriyatno, Bc.I.P., S.H., M.H.
NIP. 19690823 199203 1 001**